WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR: 100.3.3.3/128/HK/410.020.3/2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data statistik sektoral Kota Blitar Tahun 2019-2024, telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sehingga perlu dilakukan penyebarluasan data;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Data Statistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Mei 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/128/HK/410.020.3/2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH DALAM *E-WALIDATA*
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01.000013	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
2.	1.01.000014	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	0	Dinas Pendidikan
3.	1.01.000015	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan	57	57	57	57	57	57	Dinas Pendidikan
4.	1.01.000022	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
5.	1.01.000023	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
6.	1.01.000024	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	50	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan
7.	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	258	80	83	83	83	31	Dinas Pendidikan
8.	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Diselenggarakan oleh Masyarakat		Diselenggarakan oleh Masyarakat							
9.	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	1	1	1	0	11	Dinas Pendidikan
10.	1.01.000049	Fasilitas bermain	Unit	Jumlah fasilitas bermain yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
11.	1.01.000050	Fasilitas Parkir	Unit	Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
12.	1.01.000051	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah fasilitas parkir yang perlu di rehabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
13.	1.01.000052	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
14.	1.01.000053	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
15.	1.01.000054	Gedung PAUD	Unit	Jumlah gedung paud yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
16.	1.01.000055	Gedung PAUD yang layak	Unit	Jumlah gedung paud yang layak	188	188	183	180	175	170	Dinas Pendidikan
17.	1.01.000056	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi	135	120	125	124	111	105	Dinas Pendidikan
18.	1.01.000057	Gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah gedung paud yang rusak sedang/berat	40	45	25	35	30	38	Dinas Pendidikan
19.	1.01.000058	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi	4	0	7	0	2	3	Dinas Pendidikan
20.	1.01.000059	Gedung PKBM	Unit	Jumlah gedung pkbm	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
21.	1.01.000060	Gedung PKBM yang layak	Unit	Jumlah gedung pkbm yang layak	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
22.	1.01.000061	Gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23.	1.01.000062	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
24.	1.01.000063	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
25.	1.01.000068	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah kantin sekolah yang perlu direhabilitasi	3	3	3	1	1	1	Dinas Pendidikan
26.	1.01.000069	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Unit	Jumlah kantin sekolah yang telah dibangun	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
27.	1.01.000070	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah kantin sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
28.	1.01.000071	Kekurangan pendidik	Orang	Jumlah kekurangan pendidik	73	107	106	106	148	251	Dinas Pendidikan
29.	1.01.000074	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
30.	1.01.000075	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	0	0	1	2	1	1	Dinas Pendidikan
31.	1.01.000082	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi	3	3	2	1	1	2	Dinas Pendidikan
32.	1.01.000083	Media pendidikan	Paket	Jumlah media pendidikan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
33.	1.01.000084	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
34.	1.01.000086	Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
35.	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	1316	1285	1302	1268	1243	566	Dinas Pendidikan
36.	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	396	396	365	339	403	1265	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37.	1.01.000093	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	522	522	555	528	515	536	Dinas Pendidikan
38.	1.01.000094	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	315	315	291	283	278	217	Dinas Pendidikan
39.	1.01.000096	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	3	48	50	177	60	372	Dinas Pendidikan
40.	1.01.000097	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	18	8	19	25	7	6	Dinas Pendidikan
41.	1.01.000098	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	Jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	440	345	580	538	560	625	Dinas Pendidikan
42.	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	Dinas Pendidikan
43.	1.01.000101	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	3	3	3	3	18	3	Dinas Pendidikan
44.	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	Dinas Pendidikan
45.	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang didistribusikan	1687	1842	2388	2301	2324	2333	Dinas Pendidikan
46.	1.01.000110	Pendidik Non ASN	Orang	Jumlah pendidik non asn yang tersedia	250	250	258	272	490	66	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47.	1.01.000111	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan	269	269	269	269	390	299	Dinas Pendidikan
48.	1.01.000112	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	53	50	53	53	53	6	Dinas Pendidikan
49.	1.01.000113	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	1	1	0	1	1	1	Dinas Pendidikan
50.	1.01.000114	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	Jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia	263	263	263	210	207	280	Dinas Pendidikan
51.	1.01.000115	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	68	68	68	68	140	132	Dinas Pendidikan
52.	1.01.000116	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	87	87	84	78	70	50	Dinas Pendidikan
53.	1.01.000117	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	816	816	816	801	879	742	Dinas Pendidikan
54.	1.01.000119	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	552	552	552	545	549	83	Dinas Pendidikan
55.	1.01.000120	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	552	552	552	545	549	83	Dinas Pendidikan
56.	1.01.000126	Perabot	Paket	Jumlah sekolah yang memiliki perabot lengkap	57	57	57	57	57	57	Dinas Pendidikan
57.	1.01.000127	Peralatan Pendidikan	Paket	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan pendidikan yang lengkap	57	57	57	57	57	57	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58.	1.01.000128	Perlengkapan lain	Paket	Jumlah perlengkapan lain yang ada pada satuan pendidikan	7	7	7	7	7	14	Dinas Pendidikan
59.	1.01.000129	Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi	10	10	10	2	4	4	Dinas Pendidikan
60.	1.01.000132	Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
61.	1.01.000133	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
62.	1.01.000136	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
63.	1.01.000137	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
64.	1.01.000138	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	4765	4717	4279	4887	4269	5091	Dinas Pendidikan
65.	1.01.000139	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
66.	1.01.000140	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
67.	1.01.000141	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	4932	4932	5099	5099	5099	5099	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
68.	1.01.000142	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	4932	4932	5099	5099	5099	5099	Dinas Pendidikan
69.	1.01.000143	Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	8554	8477	8566	8455	8432	8541	Dinas Pendidikan
70.	1.01.000144	Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
71.	1.01.000145	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
72.	1.01.000146	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	17	17	2	17	1	2	Dinas Pendidikan
73.	1.01.000147	Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
74.	1.01.000148	Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
75.	1.01.000149	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
76.	1.01.000150	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
77.	1.01.000151	Prasarana sekolah	Unit	Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia	17	17	17	1	20	1	Dinas Pendidikan
78.	1.01.000152	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
79.	1.01.000153	Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
80.	1.01.000154	Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81.	1.01.000155	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
82.	1.01.000156	Prasarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang layak	60	60	60	60	60	60	Dinas Pendidikan
83.	1.01.000157	Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
84.	1.01.000158	Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi	Jumlah Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
85.	1.01.000162	Rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	0	100	100	Dinas Pendidikan
86.	1.01.000163	Rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	0	1	0	Dinas Pendidikan
87.	1.01.000190	Ruang Guru	Ruang	Jumlah Ruang Guru yang tersedia	164	164	164	164	164	164	Dinas Pendidikan
88.	1.01.000191	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	0	0	0	1	0	Dinas Pendidikan
89.	1.01.000192	Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
90.	1.01.000193	Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang guru paud yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
91.	1.01.000194	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
92.	1.01.000196	Ruang Guru yang layak	Ruang	Jumlah Ruang guru yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
93.	1.01.000197	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
94.	1.01.000198	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah guru yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
95.	1.01.000200	Ruang kegiatan anak	Ruang	Jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia	2	2	2	1	1	2	Dinas Pendidikan
96.	1.01.000201	Ruang kelas	Ruang	Jumlah ruang kelas yang tersedia	2	2	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
97.	1.01.000202	Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah kelas pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
98.	1.01.000203	Ruang kelas baru yang baru ditambahkan	Ruang	Jumlah ruang kelas baru yang baru ditambahkan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
99.	1.01.000204	Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
100.	1.01.000205	Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi	2	2	2	1	1	2	Dinas Pendidikan
101.	1.01.000206	Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
102.	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	2	2	2	1	1	2	Dinas Pendidikan
103.	1.01.000208	Ruang kelas yang layak	Ruang	Jumlah ruang kelas yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
104.	1.01.000209	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
105.	1.01.000210	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
106.	1.01.000211	Ruang Kepala Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
107.	1.01.000212	Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
108.	1.01.000213	Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
109.	1.01.000218	Ruang laboratorium	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
110.	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
111.	1.01.000226	Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
112.	1.01.000241	Ruang laboratorium IPA	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
113.	1.01.000259	Ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	3	3	3	1	1	3	Dinas Pendidikan
114.	1.01.000260	Ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
115.	1.01.000261	Ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
116.	1.01.000262	Ruang PAUD yang tidak memiliki mebel	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang tidak memiliki mebel	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
117.	1.01.000263	Ruang pembelajaran	Ruang	Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
118.	1.01.000264	Ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
119.	1.01.000265	Ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
120.	1.01.000266	Ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
121.	1.01.000267	Ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki mebel	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang tidak memiliki mebel	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
122.	1.01.000268	Ruang perpustakaan	Ruang	Jumlah perpustakaan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
123.	1.01.000269	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
124.	1.01.000270	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
125.	1.01.000271	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
126.	1.01.000272	Ruang pimpinan	Ruang	Jumlah ruang pimpinan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
127.	1.01.000281	Ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
128.	1.01.000282	Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	Jumlah ruang serba guna/aula	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
129.	1.01.000283	Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang serba guna /aula yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
130.	1.01.000284	Ruang Serba Guna/Aula yang layak	Ruang	Jumlah ruang reba guna/aula yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
131.	1.01.000285	Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang serba guna/aula yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
132.	1.01.000286	Ruang sirkulasi	Ruang	Jumlah ruang sirkulasi yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
133.	1.01.000289	Ruang TU	Ruang	Jumlah ruang TU yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
134.	1.01.000295	Ruang TU yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
135.	1.01.000296	Ruang UKS	Ruang	Jumlah ruang UKS yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
136.	1.01.000297	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
137.	1.01.000298	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
138.	1.01.000299	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
139.	1.01.000300	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
140.	1.01.000301	Ruang yang memiliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
141.	1.01.000302	Ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
142.	1.01.000303	Ruang yang memiliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
143.	1.01.000304	Ruang yang tidak memiliki mebel	Ruang	Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
144.	1.01.000307	Ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
145.	1.01.000314	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	0	1	1	1	1	0	Dinas Pendidikan
146.	1.01.000321	Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	0	1	0	0	0	Dinas Pendidikan
147.	1.01.000325	Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana PAUD yang menentukan memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
148.	1.01.000326	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
149.	1.01.000327	Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
150.	1.01.000328	Sarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
151.	1.01.000329	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
152.	1.01.000330	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	2	2	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
153.	1.01.000331	Sarana sekolah	Unit	Jumlah sarana sekolah yang tersedia	2	2	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
154.	1.01.000332	Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
155.	1.01.000333	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
156.	1.01.000334	Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	1	1	1	5	5	5	Dinas Pendidikan
157.	1.01.000335	Sarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
158.	1.01.000336	Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
159.	1.01.000337	Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah sarana sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
160.	1.01.000339	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
161.	1.01.000340	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	120	120	1	120	120	160	Dinas Pendidikan
162.	1.01.000341	Satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
163.	1.01.000342	Satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	1	1	1	1	1	0	Dinas Pendidikan
164.	1.01.000343	Satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
165.	1.01.000344	Satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
166.	1.01.000345	Satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
167.	1.01.000346	Satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
168.	1.01.000347	Satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan
169.	1.01.000348	Satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan	160	160	160	160	160	160	Dinas Pendidikan
170.	1.01.000349	Satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	Satuan PAUD	Jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah	10	10	3	17	17	0	Dinas Pendidikan
171.	1.01.000350	Satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP	170	170	170	170	162	143	Dinas Pendidikan
172.	1.01.000351	Satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan PAUD	Jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar	170	170	170	170	162	143	Dinas Pendidikan
173.	1.01.000352	Satuan PAUD yang siap dievaluasi	Satuan PAUD	Jumlah satuan paud yang siap dievaluasi	160	160	160	160	160	160	Dinas Pendidikan
174.	1.01.000353	Satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
175.	1.01.000354	Satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	1	1	1	1	4	1	Dinas Pendidikan
176.	1.01.000355	Satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam	Satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam	17	17	17	17	17	17	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		penyelenggaraan proses belajar		penyelenggaraan proses belajar							
177.	1.01.000356	Satuan PAUD yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	Satuan PAUD	Jumlah satuan paud yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	1	1	1	1	2	2	Dinas Pendidikan
178.	1.01.000364	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
179.	1.01.000365	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
180.	1.01.000366	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Satuan PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
181.	1.01.000367	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
182.	1.01.000368	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
183.	1.01.000369	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	0	2	0	1	1	0	Dinas Pendidikan
184.	1.01.000370	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	Satuan PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
185.	1.01.000371	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
186.	1.01.000372	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
187.	1.01.000373	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	0	0	0	1	1	1	Dinas Pendidikan
188.	1.01.000374	Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Satuan PAUD	Jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
189.	1.01.000375	Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	Satuan PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
190.	1.01.000376	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Ruang	Jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	17	17	17	17	16	15	Dinas Pendidikan
191.	1.01.000378	Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan
192.	1.01.000380	Satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	82	82	82	82	82	82	Dinas Pendidikan
193.	1.01.000383	Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
194.	1.01.000384	Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	9	9	9	9	9	9	Dinas Pendidikan
195.	1.01.000386	Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan
196.	1.01.000387	Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan
197.	1.01.000388	Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	48	48	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
198.	1.01.000392	Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	170	170	170	170	170	170	Dinas Pendidikan
199.	1.01.000393	Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	82	82	82	82	82	82	Dinas Pendidikan
200.	1.01.000394	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	0	0	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
201.	1.01.000395	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
202.	1.01.000396	Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	0	0	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
203.	1.01.000398	Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
204.	1.01.000399	Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	4	4	4	4	1	7	Dinas Pendidikan
205.	1.01.000400	Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar		perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar							
206.	1.01.000402	Satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
207.	1.01.000403	Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
208.	1.01.000404	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
209.	1.01.000405	Sekolah Dasar yang siap dievaluasi	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
210.	1.01.000408	Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi	0	0	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
211.	1.01.000409	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos	0	0	19	19	19	19	Dinas Pendidikan
212.	1.01.000410	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
213.	1.01.000415	Sekolah yang memiliki kantin yang memadai	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah yang memiliki kantin dengan kondisi memadai	10	10	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
214.	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
215.	1.01.000417	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0	0	1	2	2	Dinas Pendidikan
216.	1.01.000418	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	0	2	2	2	Dinas Pendidikan
217.	1.01.000421	Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah pada PAUD	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
218.	1.01.000422	Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
219.	1.01.000423	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	0	4500	4700	4700	4768	3000	Dinas Pendidikan
220.	1.01.000424	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
221.	1.01.000425	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
222.	1.01.000426	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	192	156	124	141	166	170	Dinas Pendidikan
223.	1.01.000429	Siswa yang membutuhkan perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang membutuhkan perlengkapan PAUD	884	884	893	535	540	554	Dinas Pendidikan
224.	1.01.000430	Siswa yang membutuhkan perlengkapan Peserta Didik	Siswa	Jumlah siswa yang membutuhkan perlengkapan Peserta Didik	3000	3000	2500	2500	540	14000	Dinas Pendidikan
225.	1.01.000431	Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan Siswa	800	800	893	535	540	554	Dinas Pendidikan
226.	1.01.000432	Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	Siswa	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	1200	12000	12000	12000	12000	14000	Dinas Pendidikan
227.	1.01.000433	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	500	500	500	500	500	500	Dinas Pendidikan
228.	1.01.000434	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba non akademik	Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba non akademik	270	270	231	170	170	500	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
229.	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	Jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
230.	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	Jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	17	17	1	17	17	1	Dinas Pendidikan
231.	1.01.000440	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	2	Dinas Pendidikan
232.	1.01.000441	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
233.	1.01.000443	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
234.	1.01.000444	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
235.	1.01.000449	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	400	400	498	1	1	1	Dinas Pendidikan
236.	1.01.000450	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud	135	135	746	135	135	134	Dinas Pendidikan
237.	1.01.000451	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV	400	400	498	6	6	7	Dinas Pendidikan
238.	1.01.000452	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	500	500	515	182	180	186	Dinas Pendidikan
239.	1.01.000453	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang	105	105	215	31	30	33	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berkualifikasi akademik S1/DIV							
240.	1.01.000456	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama	322	322	103	103	103	103	Dinas Pendidikan
241.	1.01.000457	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama	150	150	177	25	25	25	Dinas Pendidikan
242.	1.01.000458	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
243.	1.01.000459	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	0	0	0	0	0	8	Dinas Pendidikan
244.	1.01.000460	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
245.	1.01.000461	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
246.	1.01.000462	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160	160	160	160	286	160	Dinas Pendidikan
247.	1.01.000463	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
248.	1.01.000465	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
249.	1.01.000468	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam	63	63	63	63	63	63	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
250.	1.01.000474	Unit sekolah	Unit	Jumlah unit sekolah yang tersedia	23	1	1	1	23	1	Dinas Pendidikan
251.	1.01.000475	Unit sekolah yang layak	Unit	Jumlah unit sekolah yang layak	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
252.	1.01.000476	Unit sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	2	Dinas Pendidikan
253.	1.01.000481	Usulan pendirian sekolah baru	Dokumen	Jumlah usulan pendirian sekolah baru	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
254.	1.01.000483	Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
255.	1.01.000484	Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
256.	1.01.000485	Utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
257.	1.01.000486	Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah utilitas pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
258.	1.01.000487	Utilitas sekolah	Unit	Jumlah utilitas sekolah yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
259.	1.01.000488	Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
260.	1.01.000489	Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
261.	1.01.000490	Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
262.	1.01.000491	Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
263.	1.01.000492	Utilitas sekolah yang layak	Unit	Jumlah utilitas sekolah yang layak	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
264.	1.01.000493	Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
265.	1.01.000494	Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
266.	1.01.000497	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah SD yang dikelola oleh pihak pemerintah	48	48	48	48	48	48	Dinas Pendidikan
267.	1.01.000498	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta	14	14	15	15	15	15	Dinas Pendidikan
268.	1.01.000499	jumlah Sekolah Dasar	Unit	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	62	62	63	63	63	63	Dinas Pendidikan
269.	1.01.000500	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	10718	10099	9563	8949	8742	8507	Dinas Pendidikan
270.	1.01.000501	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	3978	4001	3904	3854	3771	3653	Dinas Pendidikan
271.	1.01.000502	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	14696	14100	13467	12803	12513	12160	Dinas Pendidikan
272.	1.01.000503	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	5475	5132	4882	4553	4553	4349	Dinas Pendidikan
273.	1.01.000504	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	2077	2098	2069	2027	2027	1906	Dinas Pendidikan
274.	1.01.000505	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	7552	7230	6951	6580	2559	6253	Dinas Pendidikan
275.	1.01.000506	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	5243	4967	4681	4396	4293	4159	Dinas Pendidikan
276.	1.01.000507	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	1901	1903	1835	1827	1754	1754	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
277.	1.01.000508	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	7144	6870	6516	6223	6057	5907	Dinas Pendidikan
278.	1.01.000509	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	1524	1385	1411	1357	1302	1302	Dinas Pendidikan
279.	1.01.000510	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	694	630	598	595	640	640	Dinas Pendidikan
280.	1.01.000511	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	2218	2015	2009	1952	1942	1942	Dinas Pendidikan
281.	1.01.000512	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	1639	1506	1386	1396	1364	1364	Dinas Pendidikan
282.	1.01.000513	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	754	686	614	594	572	572	Dinas Pendidikan
283.	1.01.000514	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	2393	2192	2000	1990	1936	1936	Dinas Pendidikan
284.	1.01.000515	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	1666	1645	1499	1362	1357	1357	Dinas Pendidikan
285.	1.01.000516	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	678	757	667	607	583	583	Dinas Pendidikan
286.	1.01.000517	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar	2344	2402	2166	1969	1940	1940	Dinas Pendidikan
287.	1.01.000518	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri	1933	1674	1633	1509	1381	1381	Dinas Pendidikan
288.	1.01.000519	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta	631	678	743	653	596	596	Dinas Pendidikan
289.	1.01.000520	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar	2564	2352	2376	2162	1977	1977	Dinas Pendidikan
290.	1.01.000521	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri	1969	1928	1701	1644	1375	1375	Dinas Pendidikan
291.	1.01.000522	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta	621	630	658	736	571	571	Dinas Pendidikan
292.	1.01.000523	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar	2590	2558	2359	2380	1946	1946	Dinas Pendidikan
293.	1.01.000524	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri	1987	1961	1933	1681	1722	1722	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
294.	1.01.000525	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta	600	620	624	669	696	696	Dinas Pendidikan
295.	1.01.000526	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar	2587	2581	2557	2350	2418	2418	Dinas Pendidikan
296.	1.01.000527	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di bawah 7 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia di bawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	10	273	259	241	84	84	Dinas Pendidikan
297.	1.01.000528	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di bawah 7 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia di bawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	5	181	175	196	93	93	Dinas Pendidikan
298.	1.01.000529	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di bawah 7 tahun	Orang	Jumlah siswa usia di bawah 7 tahun pada Sekolah Dasar	15	454	434	437	177	177	Dinas Pendidikan
299.	1.01.000533	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di atas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia di atas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	1557	88	0	0	292	292	Dinas Pendidikan
300.	1.01.000534	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di atas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia di atas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	386	29	0	0	98	98	Dinas Pendidikan
301.	1.01.000535	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia di atas 12 tahun	Orang	Jumlah siswa usia di atas 12 tahun pada Sekolah Dasar	1943	117	0	0	390	390	Dinas Pendidikan
302.	1.01.000536	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri	19	12	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
303.	1.01.000537	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta	0	2	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
304.	1.01.000538	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar	19	14	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
305.	1.01.000539	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0	4	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
306.	1.01.000540	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
307.	1.01.000541	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar	0	4	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
308.	1.01.000542	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri	190	638	0	0	503	503	Dinas Pendidikan
309.	1.01.000543	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta	97	259	0	0	227	227	Dinas Pendidikan
310.	1.01.000544	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar	287	897	0	0	730	730	Dinas Pendidikan
311.	1.01.000545	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	61	194	0	0	150	150	Dinas Pendidikan
312.	1.01.000546	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	25	74	0	0	53	53	Dinas Pendidikan
313.	1.01.000547	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	86	268	0	0	933	933	Dinas Pendidikan
314.	1.01.000548	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	129	444	0	0	353	353	Dinas Pendidikan
315.	1.01.000549	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	72	185	0	0	174	174	Dinas Pendidikan
316.	1.01.000550	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	201	629	0	0	527	527	Dinas Pendidikan
317.	1.01.000551	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah di bawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	49	18	10	6	546	546	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
318.	1.01.000552	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah di bawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	17	8	7	8	242	242	Dinas Pendidikan
319.	1.01.000553	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah di bawah s1	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah di bawah S1 pada Sekolah Dasar	66	26	17	14	6	6	Dinas Pendidikan
320.	1.01.000554	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 ke atas negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 ke atas pada Sekolah Dasar Negeri	515	563	568	556	546	546	Dinas Pendidikan
321.	1.01.000555	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 ke atas swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 ke atas pada Sekolah Dasar Swasta	219	221	248	245	242	242	Dinas Pendidikan
322.	1.01.000556	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 ke atas	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 ke atas pada Sekolah Dasar	734	784	816	801	788	788	Dinas Pendidikan
323.	1.01.000557	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	25	35	0	0	109	109	Dinas Pendidikan
324.	1.01.000558	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	15	19	0	0	37	37	Dinas Pendidikan
325.	1.01.000559	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	40	54	0	0	146	146	Dinas Pendidikan
326.	1.01.000560	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	23	52	0	0	16	16	Dinas Pendidikan
327.	1.01.000561	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	20	21	0	0	25	25	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
328.	1.01.000562	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	43	73	0	0	41	41	Dinas Pendidikan
329.	1.01.000563	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	1	0	0	0	83	83	Dinas Pendidikan
330.	1.01.000564	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta	10	0	0	0	34	34	Dinas Pendidikan
331.	1.01.000565	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	11	0	0	0	117	117	Dinas Pendidikan
332.	1.01.000566	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah di atas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri	47	87	0	0	29	29	Dinas Pendidikan
333.	1.01.000567	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah di atas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Swasta	25	40	0	0	18	18	Dinas Pendidikan
334.	1.01.000568	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah di atas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar	72	127	0	0	47	47	Dinas Pendidikan
335.	1.01.000569	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri	403	391	381	371	407	407	Dinas Pendidikan
336.	1.01.000570	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta	164	167	170	169	159	159	Dinas Pendidikan
337.	1.01.000571	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar	567	558	551	540	566	566	Dinas Pendidikan
338.	1.01.000572	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri	437	435	433	411	464	464	Dinas Pendidikan
339.	1.01.000573	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta	169	171	178	172	181	181	Dinas Pendidikan
340.	1.01.000574	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar	606	606	611	583	645	645	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
341.	1.01.000575	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri	28	162	180	293	447	447	Dinas Pendidikan
342.	1.01.000576	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta	26	90	66	113	180	180	Dinas Pendidikan
343.	1.01.000577	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar	54	252	246	406	627	627	Dinas Pendidikan
344.	1.01.000578	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri	369	273	253	65	17	17	Dinas Pendidikan
345.	1.01.000579	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta	130	81	112	49	1	1	Dinas Pendidikan
346.	1.01.000580	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar	499	354	365	114	18	18	Dinas Pendidikan
347.	1.01.000581	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri	29	0	0	31	0	0	Dinas Pendidikan
348.	1.01.000582	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta	13	0	0	6	0	0	Dinas Pendidikan
349.	1.01.000583	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar	42	0	0	37	0	0	Dinas Pendidikan
350.	1.01.000584	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri	11	0	0	22	0	0	Dinas Pendidikan
351.	1.01.000585	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	4	4	0	Dinas Pendidikan
352.	1.01.000586	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar	11	0	0	26	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
353.	1.01.000587	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
354.	1.01.000588	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
355.	1.01.000589	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
356.	1.01.000590	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	48	87	0	0	20	20	Dinas Pendidikan
357.	1.01.000591	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	35	40	0	0	16	16	Dinas Pendidikan
358.	1.01.000592	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar	83	127	0	0	36	36	Dinas Pendidikan
359.	1.01.000593	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah sekolah menengah pertama negeri	9	9	9	9	9	9	Dinas Pendidikan
360.	1.01.000594	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah sekolah menengah pertama swasta	11	11	11	11	10	11	Dinas Pendidikan
361.	1.01.000595	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah sekolah menengah pertama	20	20	20	20	19	20	Dinas Pendidikan
362.	1.01.000596	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	7351	7245	7221	7099	5528	7159	Dinas Pendidikan
363.	1.01.000597	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	1300	1324	1364	1355	1319	1390	Dinas Pendidikan
364.	1.01.000598	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	8651	8569	8585	8454	6847	8549	Dinas Pendidikan
365.	1.01.000599	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3795	3803	3766	3715	3651	3651	Dinas Pendidikan
366.	1.01.000600	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	569	536	535	553	599	599	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
367.	1.01.000601	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	4364	4339	4301	4268	4148	4250	Dinas Pendidikan
368.	1.01.000602	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3556	3442	3455	3384	3476	3476	Dinas Pendidikan
369.	1.01.000603	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	731	788	829	802	798	798	Dinas Pendidikan
370.	1.01.000604	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	4287	4230	4284	4186	4817	4274	Dinas Pendidikan
371.	1.01.000605	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2523	2389	2436	2386	2101	2101	Dinas Pendidikan
372.	1.01.000606	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	466	453	445	471	475	475	Dinas Pendidikan
373.	1.01.000607	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	2989	2842	2881	2857	2485	2485	Dinas Pendidikan
374.	1.01.000608	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2420	2500	2365	2392	2288	2288	Dinas Pendidikan
375.	1.01.000609	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	413	490	457	426	439	439	Dinas Pendidikan
376.	1.01.000610	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	2833	2990	2822	2818	2727	2727	Dinas Pendidikan
377.	1.01.000611	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2408	2356	2420	2321	2738	2738	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
378.	1.01.000612	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	421	381	462	458	483	483	Dinas Pendidikan
379.	1.01.000613	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	2829	2737	2882	2779	3221	3221	Dinas Pendidikan
380.	1.01.000614	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
381.	1.01.000615	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
382.	1.01.000616	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
383.	1.01.000617	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
384.	1.01.000618	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
385.	1.01.000619	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
386.	1.01.000620	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
387.	1.01.000621	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
388.	1.01.000622	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
389.	1.01.000629	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia di atas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia di atas 12 tahun yang ada pada	1968	217	195	3012	7044	7044	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sekolah Menengah Pertama Negeri							
390.	1.01.000630	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia di atas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia di atas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	322	58	43	675	1349	1349	Dinas Pendidikan
391.	1.01.000631	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia di atas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia di atas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama	2290	275	238	3687	8393	8393	Dinas Pendidikan
392.	1.01.000632	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	64	57	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
393.	1.01.000633	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	8	24	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
394.	1.01.000634	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama	72	81	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
395.	1.01.000635	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	1	0	0	0	Dinas Pendidikan
396.	1.01.000636	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
397.	1.01.000637	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	1	0	0	0	Dinas Pendidikan
398.	1.01.000638	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	163	427	0	0	208	208	Dinas Pendidikan
399.	1.01.000639	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	94	131	0	0	65	65	Dinas Pendidikan
400.	1.01.000640	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama	257	558	0	0	275	275	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
401.	1.01.000641	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	63	148	0	0	87	87	Dinas Pendidikan
402.	1.01.000642	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	32	45	0	0	21	21	Dinas Pendidikan
403.	1.01.000643	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	95	193	0	0	108	108	Dinas Pendidikan
404.	1.01.000644	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	100	279	0	0	121	121	Dinas Pendidikan
405.	1.01.000645	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	62	86	0	0	44	44	Dinas Pendidikan
406.	1.01.000646	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	162	365	0	0	165	165	Dinas Pendidikan
407.	1.01.000647	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah di bawah s1 negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	47	10	2	2	0	0	Dinas Pendidikan
408.	1.01.000648	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah di bawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	2	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
409.	1.01.000649	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah di bawah s1	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	49	11	3	3	1	1	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
410.	1.01.000650	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 ke atas negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	350	398	435	429	208	208	Dinas Pendidikan
411.	1.01.000651	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 ke atas swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	115	122	117	116	64	64	Dinas Pendidikan
412.	1.01.000652	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 ke atas	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama	465	520	552	545	272	272	Dinas Pendidikan
413.	1.01.000653	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	38	47	0	0	65	65	Dinas Pendidikan
414.	1.01.000654	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	9	10	0	0	8	8	Dinas Pendidikan
415.	1.01.000655	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	47	57	0	0	73	73	Dinas Pendidikan
416.	1.01.000656	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	30	38	0	0	19	19	Dinas Pendidikan
417.	1.01.000657	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	11	12	0	0	11	11	Dinas Pendidikan
418.	1.01.000658	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	41	50	0	0	30	30	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
419.	1.01.000659	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	16	0	0	0	51	51	Dinas Pendidikan
420.	1.01.000660	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	2	0	0	0	11	11	Dinas Pendidikan
421.	1.01.000661	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama	18	0	0	0	62	62	Dinas Pendidikan
422.	1.01.000662	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah di atas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	52	85	0	0	18	18	Dinas Pendidikan
423.	1.01.000663	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah di atas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	18	22	0	0	8	8	Dinas Pendidikan
424.	1.01.000664	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah di atas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah di atas SMA pada Sekolah Menengah Pertama	70	107	0	0	26	26	Dinas Pendidikan
425.	1.01.000665	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	240	236	235	231	242	242	Dinas Pendidikan
426.	1.01.000666	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	54	57	59	59	49	49	Dinas Pendidikan
427.	1.01.000667	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama	294	293	294	290	291	291	Dinas Pendidikan
428.	1.01.000668	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	251	248	250	240	255	255	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
429.	1.01.000669	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	51	54	58	53	61	61	Dinas Pendidikan
430.	1.01.000670	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama	302	302	308	293	316	316	Dinas Pendidikan
431.	1.01.000671	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	58	61	186	252	252	Dinas Pendidikan
432.	1.01.000672	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	9	45	42	33	56	56	Dinas Pendidikan
433.	1.01.000673	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama	11	103	103	219	308	308	Dinas Pendidikan
434.	1.01.000674	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	249	190	189	51	3	3	Dinas Pendidikan
435.	1.01.000675	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	42	9	16	20	5	5	Dinas Pendidikan
436.	1.01.000676	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Pertama	291	199	205	71	8	8	Dinas Pendidikan
437.	1.01.000677	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	2	0	0	Dinas Pendidikan
438.	1.01.000678	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
439.	1.01.000679	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	2	0	0	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
440.	1.01.000680	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	1	0	0	Dinas Pendidikan
441.	1.01.000681	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0			Dinas Pendidikan
442.	1.01.000682	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
443.	1.01.000683	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	1	0	0	Dinas Pendidikan
444.	1.01.000684	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
445.	1.01.000685	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
446.	1.01.000686	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
447.	1.01.000687	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	68	85	0	0	14	14	Dinas Pendidikan
448.	1.01.000688	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	20	22	0	0	8	8	Dinas Pendidikan
449.	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah sekolah menengah atas negeri	88	107	0	0	22	22	Dinas Pendidikan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
450.	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
451.	1.01.000889	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan
452.	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	4	4	4	4	6	6	Dinas Kesehatan
453.	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	11	11	11	11	11	20	Dinas Kesehatan
454.	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya		yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan							
455.	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Penunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk	23	27	36	48	48	49	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.							
456.	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	6723	6814	16480	17520	21749	20014	Dinas Kesehatan
457.	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat	54	55	50	66	71	71	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
458.	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin							
459.	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya							
460.	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat	54	55	50	66	71	71	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin							
461.	1.02.000014	Balita	Orang	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.	5814	4443	2421	4864	7674	8665	Dinas Kesehatan
462.	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan	1979	2029	1804	1654	2026	2231	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir							
463.	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
464.	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	41	36	41	34	45	50	Dinas Kesehatan
465.	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah	8	9	9	9	8	8	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak							
466.	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	2	4	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
467.	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	3	4	5	6	6	6	Dinas Kesehatan
468.	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang	3	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung							
469.	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	3	11	11	10	10	10	Dinas Kesehatan
470.	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah dokter spesialis kesehatan jiwa	0	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
471.	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	2	3	4	5	5	Dinas Kesehatan
472.	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah dokter spesialis mata	2	4	5	6	7	7	Dinas Kesehatan
473.	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah dokter spesialis paru	0	4	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
474.	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah dokter spesialis penyakit dalam	3	8	9	12	11	10	Dinas Kesehatan
475.	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah dokter spesialis radiologi	2	4	4	4	3	3	Dinas Kesehatan
476.	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah dokter spesialis tht	1	3	3	4	4	4	Dinas Kesehatan
477.	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah dokter spesialis urologi	1	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
478.	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah dokter umum	125	124	125	126	126	164	Dinas Kesehatan
479.	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
480.	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
481.	1.02.000044	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	2	1	2	2	Dinas Kesehatan
482.	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
483.	1.02.000047	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
484.	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
485.	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0	0	0	4	5	5	Dinas Kesehatan
486.	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	0	0	1	1	1	Dinas Kesehatan
487.	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil	0	0	0	0	0	12	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak							
488.	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	1	1	2	Dinas Kesehatan
489.	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	0	0	4	1	1	1	Dinas Kesehatan
490.	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	2	1	1	3	3	Dinas Kesehatan
491.	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
492.	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
493.	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	3	3	Dinas Kesehatan
494.	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
495.	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	&Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga&							
496.	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	20	20	25	25	30	Dinas Kesehatan
497.	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0	0	0	0	8	9	Dinas Kesehatan
498.	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	1	1	2	2	2	Dinas Kesehatan
499.	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	3	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
500.	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	0	0	0	0	6	7	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
501.	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	0	0	0	36	48	48	Dinas Kesehatan
502.	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
503.	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
504.	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	9	9	9	10	17	30	Dinas Kesehatan
505.	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan	44	44	44	44	43	39	Dinas Kesehatan
506.	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
507.	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	44	44	44	43	16	1	Dinas Kesehatan
508.	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
509.	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0	0	0	1	28	43	Dinas Kesehatan
510.	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	51	50	54	60	68	72	Dinas Kesehatan
511.	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	0	0	18	18	18	18	Dinas Kesehatan
512.	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
513.	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	0	0	0	0	0	1	Dinas Kesehatan
514.	1.02.000096	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	0	0	0	0	2	2	Dinas Kesehatan
515.	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	0	0	0	0	40	63	Dinas Kesehatan
516.	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
517.	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah ibu bersalin	2024	2121	1899	1751	2109	2304	Dinas Kesehatan
518.	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	2025	2108	1865	1922	2194	2311	Dinas Kesehatan
519.	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
520.	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
521.	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	0	42	0	1	Dinas Kesehatan
522.	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	16	16	16	16	16	16	Dinas Kesehatan
523.	1.02.000106	Kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	0	0	0	5	8	8	Dinas Kesehatan
524.	1.02.000107	Kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	2	2	Dinas Kesehatan
525.	1.02.000110	Keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	0	0	0	1240	9056	2841	Dinas Kesehatan
526.	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
527.	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
528.	1.02.000114	Obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3	5	2	2	3	5	Dinas Kesehatan
529.	1.02.000118	Orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	2643	5456	4933	3929	4843	5552	Dinas Kesehatan
530.	1.02.000119	Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	1990	1676	1503	2661	3537	3304	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
531.	1.02.000120	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	299	297	274	329	290	291	Dinas Kesehatan
532.	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah paket spesimen penyakit potensial klb	54	1738	1906	27	34	28	Dinas Kesehatan
533.	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah pengolahan limbah	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
534.	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry	9	9	10	10	11	12	Dinas Kesehatan
535.	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD	8	9	9	10	10	11	Dinas Kesehatan
536.	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi	40	45	45	45	47	47	Dinas Kesehatan
537.	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	10	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
538.	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	76	78	78	78	80	82	Dinas Kesehatan
539.	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif	75	75	78	78	78	91	Dinas Kesehatan
540.	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan administrasi	103	103	103	103	105	107	Dinas Kesehatan
541.	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	60	62	62	62	62	65	Dinas Kesehatan
542.	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi	60	65	65	71	72	79	Dinas Kesehatan
543.	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi&	20	23	23	23	25	27	Dinas Kesehatan
544.	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	315	320	320	320	325	358	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
545.	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik	17	17	17	17	17	17	Dinas Kesehatan
546.	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran	72	72	72	72	72	72	Dinas Kesehatan
547.	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	436	436	436	436	436	436	Dinas Kesehatan
548.	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
549.	1.02.000159	Prasarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Prasarana di Fasyankes	26	26	26	26	26	26	Dinas Kesehatan
550.	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah produk makanan-minuman industri rumah tangga beredar	0	0	0	0	40	44	Dinas Kesehatan
551.	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah public safety center (psc 119)	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
552.	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah puskesmas	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
553.	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
554.	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah ruang asi	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
555.	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah ruang bank darah rumah sakit	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
556.	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
557.	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah ruang farmasi	11	11	11	11	11	16	Dinas Kesehatan
558.	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah ruang gawat darurat	11	11	11	11	11	12	Dinas Kesehatan
559.	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah ruang gizi	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
560.	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Jumlah Ruang jaga petugas	13	13	13	13	13	13	Dinas Kesehatan
561.	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah ruang jenazah	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
562.	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
563.	1.02.000178	Ruang Kepala Puskesmas	Unit	Jumlah ruang kepala puskesmas	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
564.	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan imunisasi	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan imunisasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
565.	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
566.	1.02.000181	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
567.	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	Jumlah ruang kie	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
568.	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah ruang laboraturium	11	11	11	11	11	11	Dinas Kesehatan
569.	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	Jumlah ruang loundry	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
570.	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah ruang operasi	3	3	3	5	5	5	Dinas Kesehatan
571.	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah ruang parkir	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
572.	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah ruang pemeliharaan sarpras	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
573.	1.02.000189	Ruang pemeriksaan umum	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan umum	101	127	124	105	126	142	Dinas Kesehatan
574.	1.02.000190	Ruang Penanggulangan Kebakaran	Unit	Jumlah ruang penanggulangan kebakaran	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
575.	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik	101	127	124	105	126	144	Dinas Kesehatan
576.	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah ruang pengelolaan gas medik	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
577.	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
578.	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
579.	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
580.	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah ruang radiologi	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
581.	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
582.	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah ruang rawat inap	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
583.	1.02.000199	Ruang Rawat intensif:	Unit	Jumlah ruang rawat intensif	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
584.	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah ruang rawat jalan	19	19	19	19	19	19	Dinas Kesehatan
585.	1.02.000201	Ruang rawat pasca persalinan	Unit	Jumlah Ruang rawat pasca persalinan	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
586.	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah ruang rehabilitasi medik	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
587.	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah ruang rekam medis	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
588.	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah ruang sterilisasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
589.	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat darurat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
590.	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	Jumlah Ruang tunggu	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
591.	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
592.	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
593.	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
594.	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
595.	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
596.	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
597.	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	5	4	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
598.	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
599.	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
600.	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
601.	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
602.	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
603.	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	0	0	1	0	0	0	Dinas Kesehatan
604.	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	1324	1351	1364	1383	1398	1463	Dinas Kesehatan
605.	1.02.000224	Sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0	0	0	0	40	44	Dinas Kesehatan
606.	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	54	1738	1906	27	34	28	Dinas Kesehatan
607.	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	624	643	713	695	680	658	Dinas Kesehatan
608.	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah tenaga apotek	94	150	158	153	188	204	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
609.	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	29	29	30	38	35	35	Dinas Kesehatan
610.	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah tenaga kebidanan	142	156	180	171	180	180	Dinas Kesehatan
611.	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	142	156	180	171	180	180	Dinas Kesehatan
612.	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan	682	683	761	802	808	844	Dinas Kesehatan
613.	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut Perawat Spesialis. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga	682	683	761	802	808	844	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya							
614.	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	676	670	260	305	326	362	Dinas Kesehatan
615.	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga	237	231	260	305	326	362	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya							
616.	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	11	13	12	13	10	13	Dinas Kesehatan
617.	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat	5	12	20	31	35	55	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat							
618.	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional	439	439	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
619.	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis	47	54	62	71	79	87	Dinas Kesehatan
620.	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik	12	15	19	18	24	29	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
621.	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika	133	108	117	134	143	143	Dinas Kesehatan
622.	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
623.	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui.							
624.	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
625.	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	6	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
626.	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	0	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
627.	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Memiliki Izin/habis Masa Izinnya		belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya							
628.	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	Jumlah pedagang besar farmasi (pbf) cabang yang memiliki izin	0	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
629.	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Jumlah penderita diabetes melitus	3747	1787	2979	37170	4057	4079	Dinas Kesehatan
630.	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Jumlah penderita hipertensi	39422	4213	8132	4427	48321	49680	Dinas Kesehatan
631.	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jumlah penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	129879	150865	152311	157795	154583	161733	Dinas Kesehatan
632.	1.02.000267	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB	54	1738	1606	27	34	28	Dinas Kesehatan
633.	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi	54	1738	1906	27	34	28	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
634.	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	54	1738	1906	27	34	28	Dinas Kesehatan
635.	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah penduduk usia lanjut	11628	14492	18673	20544	2210	21683	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
636.	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Jumlah penduduk usia produktif	80936	24632	34102	93758	95973	100350	Dinas Kesehatan
637.	1.02.000272	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik	1275	1311	1352	1430	1507	1233	Dinas Kesehatan
638.	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah pengolahan limbah	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
639.	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya.	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
640.	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
641.	1.02.000280	Kasus Penyakit IMS	Kasus	Jumlah kasus penyakit ims	19	25	34	36	59	227	Dinas Kesehatan
642.	1.02.000281	Kasus Penyakit Campak	Kasus	Jumlah kasus penyakit campak	13	8	4	2	26	27	Dinas Kesehatan
643.	1.02.000286	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	Jumlah kasus penyakit filariasis	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
644.	1.02.000287	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	Jumlah kasus penyakit kecacingan	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
645.	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
646.	1.02.000295	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
647.	1.02.000297	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
648.	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0	0	0	1	20	24	Dinas Kesehatan
649.	1.02.000312	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	0	0	0	2	6	0	Dinas Kesehatan
650.	1.02.000313	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	0	0	0	0	1	2	Dinas Kesehatan
651.	1.02.000319	penderita Tuberkulosis	Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	280	363	260	374	398	430	Dinas Kesehatan
652.	1.02.000320	Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	280	363	260	374	398	27	Dinas Kesehatan
653.	1.02.000321	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	Jumlah penderita hiv (odhiv)	143	118	90	106	100	91	Dinas Kesehatan
654.	1.02.000322	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	143	118	90	106	100	91	Dinas Kesehatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
655.	1.02.000324	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria	0	8	2	8	5	2	Dinas Kesehatan
656.	1.02.000330	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok	7	7	7	7	7	7	Dinas Kesehatan
657.	1.02.000331	Tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	2	2	2	3	4	4	Dinas Kesehatan
658.	1.03.000005	Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
659.	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
660.	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
661.	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
662.	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0	0	2	0	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
663.	1.03.000026	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. Pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. Ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau c. Pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. Pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.							
664.	1.03.000031	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
665.	1.03.000032	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
666.	1.03.000033	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
667.	1.03.000035	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
668.	1.03.000037	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
669.	1.03.000038	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / wali kota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
670.	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
671.	1.03.000043	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota		pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.							Umum dan Penataan Ruang
672.	1.03.000044	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
673.	1.03.000051	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
674.	1.03.000055	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tertinggi di perangkat daerah tersebut.							
675.	1.03.000067	Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
676.	1.03.000069	Dokumen Hasil Survei Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
677.	1.03.000070	Dokumen Hasil Survei Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investasi jembatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
678.	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.							Penataan Ruang
679.	1.03.000075	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
680.	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
681.	1.03.000079	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	Jumlah unit yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Keistimewaan Urusan Tata Ruang		keistimewaan urusan tata ruang							Penataan Ruang
682.	1.03.000080	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
683.	1.03.000081	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
684.	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
685.	1.03.000084	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0	0	3	0	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
686.	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
687.	1.03.000088	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
688.	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
689.	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
690.	1.03.000127	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
691.	1.03.000130	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
692.	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
693.	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	1	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
694.	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia							
695.	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
696.	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
697.	1.03.000137	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	Laporan dokumen perencanaan program/kegiatan urusan tata ruang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penataan Ruang
698.	1.03.000139	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dihapus sesuai PP 21/2021	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
699.	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).							
700.	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
701.	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
702.	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayanan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana	1	0	1	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kelembagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat							
703.	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
704.	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
705.	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
706.	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penataan Ruang
707.	1.03.000178	Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan. (Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2020) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bertujuan untuk memberikan bantuan dalam hal Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
708.	1.03.000182	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
709.	1.03.000186	Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi	Dokumen	Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).							Penataan Ruang
710.	1.03.000189	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
711.	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
712.	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	Bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	0	0	0	0	142	132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
713.	1.03.000198	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten. Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
714.	1.03.000203	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Laporan hasil kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penataan ruang	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
715.	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
716.	1.03.000215	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
717.	1.03.000216	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
718.	1.03.000219	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
719.	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
720.	1.03.000226	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota.							
721.	1.03.000227	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
722.	1.03.000228	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
723.	1.03.000236	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
724.	1.03.000237	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
725.	1.03.000239	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
726.	1.03.000241	Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang	Ha	Laporan luas lahan yang ditertibkan dalam bidang penataan ruang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
727.	1.03.000243	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam	Dokumen	Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana		rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana							Penataan Ruang
728.	1.03.000244	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dokumen	Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
729.	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
730.	1.03.000249	Panjang Jalan	Km	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	263,967	263,967	1,2	263,967	5,25	251,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
731.	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0,638	0,638	0,638	0,638	91.316,06	0,638	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
732.	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
733.	1.03.000254	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
734.	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.							
735.	1.03.000257	Panjang Sungai	Km	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
736.	1.03.000258	Panjang Tanggul	Km	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
737.	1.03.000268	Penerbitan PKKPR	Dokumen	Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.	19	19	19	19	19	19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
738.	1.03.000269	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
739.	1.03.000276	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab/Kota dengan DPRD Kab/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
740.	1.03.000278	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Dokumen	Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
741.	1.03.000279	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	Laporan jumlah Penyidik Pegawai Negeri ipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
742.	1.03.000281	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
743.	1.03.000285	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
744.	1.03.000286	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
745.	1.03.000290	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten. Kota beserta lampiran (dalam	Dokumen	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		format softcopy dan hardcopy)		lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)							Penataan Ruang
746.	1.03.000292	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
747.	1.03.000293	Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan rapat fasilitasi rrtr kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
748.	1.03.000294	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Notulensi rapat koordinasi pelaksanaan penataan ruang	12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
749.	1.03.000296	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
750.	1.03.000298	Rapat persetujuan substansi	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021).							Penataan Ruang
751.	1.03.000299	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
752.	1.03.000300	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
753.	1.03.000301	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
754.	1.03.000303	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				perwakilan dari para pihak yang hadir							
755.	1.03.000304	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	Duplikasi dengan nomor 271	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
756.	1.03.000306	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
757.	1.03.000307	Rumah Deret	Rumah		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
758.	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
759.	1.03.000311	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
760.	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
761.	1.03.000332	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil kegiatan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
762.	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
763.	1.03.000341	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dokumen	Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
764.	1.03.000342	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dokumen	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
765.	1.03.000345	Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota	Dokumen	Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
766.	1.03.000347	Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
767.	1.03.000350	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Dokumen	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
768.	1.03.000351	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dokumen	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
769.	1.03.000352	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/wali kota	Dokumen	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
770.	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan b. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
771.	1.03.000364	Underpass	Underpass	Jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
772.	1.03.000367	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dokumen	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
773.	1.03.000373	Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang	Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&	0	3	0	3	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
774.	1.03.000374	Jumlah Penilik	Orang	Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
775.	1.03.000375	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	0	2	0	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
776.	1.03.000378	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
777.	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
778.	1.03.000386	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Orang	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.							Penataan Ruang
779.	1.03.000387	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan	27	144	27	144	144	144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
780.	1.03.000388	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. Badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. Badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya	144	144	144	144	144	144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
781.	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
782.	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
783.	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
784.	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
785.	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
786.	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
787.	1.03.000398	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Belum tersedianya proses penyelenggaraan BGCB di dalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
788.	1.03.000399	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
789.	1.03.000400	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. B. Identifikasi nilai penting dan arti khusus c. Pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. Studi kelayakan Pelestarian BGCB.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
790.	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. B. Identifikasi nilai penting dan arti khusus c. Pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. Studi kelayakan Pelestarian BGCB.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
791.	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah	242	242	242	242	242	242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
792.	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (hdno) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
793.	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis	Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala		sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung							Penataan Ruang
794.	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
795.	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
796.	1.03.000411	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teknis Bangunan Gedung.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
797.	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
798.	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi	2	2	0	2	0	2	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan		standar teknis Bangunan Gedung.							Penataan Ruang
799.	1.03.000414	Jumlah Bangunan Konstruksi	Unit	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
800.	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
801.	1.03.000417	Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
802.	1.03.000419	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dokumen	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	2	0	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
803.	1.03.000421	Jumlah Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
804.	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.	0	1	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
805.	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detail e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
806.	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detail e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.							
807.	1.03.000425	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama sub varian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama sub varian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
808.	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	Skema KPDBU mencakup Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
809.	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama sub varian produk, sertifikat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama sub varian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.							
810.	1.03.000428	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	Data dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
811.	1.03.000429	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok	Dokumen	1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.	0	1	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
812.	1.03.000430	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.							Penataan Ruang
813.	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	0	1	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
814.	1.03.000433	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi sub klasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	0	1	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
815.	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
816.	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling	0	1	0	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi		sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.							Penataan Ruang
817.	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	1	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
818.	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
819.	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, sub klasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
820.	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Kajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi,	0	1	0	0	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. Rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. Kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. Kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013&							
821.	1.03.000444	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	1	3	0	2	2	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
822.	1.03.000446	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintahan Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
823.	1.03.000447	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.							
824.	1.03.000449	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
825.	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	-Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
826.	1.03.000452	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
827.	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. Pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. Ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. Pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. Pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
828.	1.03.000455	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. Pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. Ketaatan penerapan peraturan terkait	1	3	0	0	2	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. Pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. Pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.							
829.	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. Laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				final hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. Surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. Surat pernyataan kelaikan fungsi.							
830.	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia							
831.	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
832.	1.03.000460	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapannya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	1	2	0	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
833.	1.03.000462	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi adalah dokumen atau laporan perizinan berusaha berbasis risiko sub sektor Jasa konstruksi yang dievaluasi dan dipantau agar tertib dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
834.	1.03.000464	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
835.	1.03.000466	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sub sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
836.	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
837.	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
838.	1.03.000480	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen rtbl mengacu pada rencana tata	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam rtbl di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (rth), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.							
839.	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
840.	1.03.000482	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	Dokumen	Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
841.	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
842.	1.03.000484	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci merupakan perencanaan detail TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	1	1	0	0	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
843.	1.03.000486	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melalui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari	39	39	0	0	39	39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
844.	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
845.	1.03.000492	Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Dokumen	Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnya							Penataan Ruang
846.	1.03.000494	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
847.	1.03.000495	Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	&Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.&							
848.	1.03.000497	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
849.	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	1	1	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
850.	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan	Kabupaten/Kota	1. Bimbingan teknis dan pengawasan & evaluasi pp	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan		16/2021 2. Bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara 3. Pendampingan penyusunan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara							Umum dan Penataan Ruang
851.	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik	1	1	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
852.	1.03.000504	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kegiatan	Belum tersedianya proses penyelenggaraan BGCB di dalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
853.	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
854.	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan							
855.	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
856.	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM							
857.	1.03.000512	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	22	22	22	22	22	22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
858.	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
859.	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	Jumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
860.	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
861.	1.03.000517	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
862.	1.03.000519	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
863.	1.03.000520	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.							
864.	1.03.000521	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
865.	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
866.	1.03.000530	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
867.	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
868.	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan	70	70	67	68	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terpusat, terdiri atas: a. Pipa retikulasi b. Pipa induk lubang kontrol (manhole) c. Bangunan penggelontor d. Terminal pembersihan (clean out) e. Pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. Stasiun pompa							
869.	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. Lubang kontrol (manhole); b. Bangunan c. Terminal pembersihan (clean out); d. Pipa perlintasan (siphon); dan e. Stasiun pompa	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
870.	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
871.	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				meliputi individual atau komunal (HU dan KU)							
872.	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	70	70	67	68	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
873.	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)	10	10	3	3	9	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
874.	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
875.	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan		0	0	0	0	227,07	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
876.	1.03.000558	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
877.	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
878.	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	22	22	22	22	22	22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
879.	1.03.000563	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
880.	1.03.000564	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dokumen	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi							
881.	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	SPA (Stasiun Peralihan Antara) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kab/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah	1	1	0	0	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
882.	1.03.000567	Jumlah SPALD	Unit	Istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	70	70	67	68	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
883.	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
884.	1.03.000570	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
885.	1.03.000571	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2,	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya							
886.	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	6	6	6	6	6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
887.	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	6	6	6	6	6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
888.	1.03.000594	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
889.	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				serta perlengkapannya dengan satuan L/detik							
890.	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
891.	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Km	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	251,096	251,096	251,096	251,096	251,3	251,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
892.	1.03.000608	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
893.	1.03.000609	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1	1	0	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
894.	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
895.	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÂ³/Hari	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan MÂ³	20	20	0	0	20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
896.	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
897.	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	70	70	67	68	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
898.	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan							
899.	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.							
900.	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
901.	1.03.000625	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	mÂ³/hari	Kapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
902.	1.03.000626	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
903.	1.03.000627	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan	10	10	3	3	9	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan							
904.	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	10	10	3	3	9	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
905.	1.03.000632	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
906.	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	70	70	67	68	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
907.	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang dibangun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
908.	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
909.	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
910.	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi Jumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki							
911.	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
912.	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
913.	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
914.	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu							
915.	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
916.	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
917.	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
918.	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
919.	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	Jumlah tampungan air lainnya yang direvitalisasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
920.	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
921.	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
922.	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
923.	1.03.000690	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Unit	Bangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
924.	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
925.	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
926.	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penataan Ruang
927.	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
928.	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
929.	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	1,037	1,037	0	1,075	1,743	1,037	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
930.	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
931.	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	1,115	1,115	2,375	0	0	1,115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
932.	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
933.	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0,84	0,84	3,038	2,116	3,485	0,84	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penataan Ruang
934.	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
935.	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
936.	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
937.	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
938.	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
939.	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
940.	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	mÂ³/detik	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penataan Ruang
941.	1.03.000739	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
942.	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
943.	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
944.	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
945.	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. Laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				akhir pekerjaan perencanaan b. Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir final hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. Surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. Surat pernyataan kelaikan fungsi.							
946.	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
947.	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional		Kawasan Sistem Perkotaan Nasional meliputi : a. Laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir final hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. Surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau							Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				manajemen konstruksi f. Surat pernyataan kelaikan fungsi.							
948.	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. Laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir final hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. Surat penjaminan atas kegagalan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. Surat pernyataan kelaikan fungsi.							
949.	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
950.	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
951.	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
952.	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
953.	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
954.	1.03.910116	Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara berfungsi membantu kuasa pengguna anggaran, kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di bidang teknis administratif pada setiap tahap pembangunan BGN	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
955.	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	3469	3469	3310	3469	3419	3469	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
956.	1.03.910120	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.							
957.	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	10407	10407	9930	10407	10257	10407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
958.	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
959.	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. Lubang kontrol (manhole); b. Bangunan c. Terminal pembersihan (clean out); d. Pipa perlintasan (siphon); dan e. Stasiun pompa	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
960.	1.03.910127	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.	10407	10407	9930	10407	10257	10407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
961.	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. Lubang kontrol (manhole); b. Bangunan c. Terminal pembersihan (clean out); d. Pipa perlintasan (siphon); dan e. Stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub sistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang menyuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya di dalam rumah	70	70	67	70	69	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
962.	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen rtbl mengacu pada rencana tata ruang dan skenario pengembangan wilayah.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
963.	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
964.	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
965.	1.03.910133	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
966.	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
967.	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
968.	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Berita Acara		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
969.	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
970.	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
971.	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
972.	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
973.	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan		19	19	19	19	19	19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
974.	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		12	12	12	12	12	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
975.	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
976.	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
977.	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
978.	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
979.	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
980.	1.03.910156	Perkada tentang RDTR Kabupaten/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
981.	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
982.	1.03.910160	Jumlah Dokumen Outline Plan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
983.	1.03.910161	Jumlah Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	...	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
984.	1.03.910162	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Orang		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
985.	1.03.910163	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	...	0	0	0	0	227,07	227,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
986.	1.03.910164	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	...	0	0	0	0		0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
987.	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	...	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
988.	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
989.	1.03.910168	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	Sarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
990.	1.03.910169	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan	Dokumen	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainase	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
991.	1.03.910170	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Meter	Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan	0	0	0	0	227,07	227,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
992.	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah		0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
993.	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
994.	1.03.910174	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota							Penataan Ruang
995.	1.03.910177	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)	3	3	3	3	5	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
996.	1.03.910178	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	3	3	3	3	0	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
997.	1.03.910179	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	0	0	0	0	5	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
998.	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	6751	6751	6751	6751	6641	6751	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
999.	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	48334	48334	48334	48334	44405	48334	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1000.	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST	1	1	0	1	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1001.	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST	1	1	0	1	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1002.	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah	1	1	0	1	0	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1003.	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.							
1004.	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	3	3	5	2	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1005.	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	1998	1998	2545,2784	398	1998	1998	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1006.	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	4	4	0	4	0	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1007.	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1008.	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/ UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. Pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang	2	2	0	2	0	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terbuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (PP Nomor 22 Tahun 2021)							
1009.	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama	2	2	0	2	0	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)							
1010.	1.03.910223	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dokumen	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. Termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1011.	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Kawasan Strategis Lainnya									
1012.	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1013.	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1014.	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1015.	1.03.910234	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/ UPL)	Dokumen	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. Pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terbuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.							
1016.	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur	Dokumen	SK Cagar Budaya adalah penetapan pemberian status Cagar Budaya terhadap benda,	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah		bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur.							Penataan Ruang
1017.	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1018.	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalam-Nya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1019.	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1020.	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1021.	1.03.910245	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1022.	1.03.910246	Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Instansi	Jumlah Instansi/Lembaga/Kelompok - Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan - Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat - Kelompok : sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sam	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1023.	1.03.910247	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara	Dokumen	Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengawasan yang dilaksanakan dalam periode satu tahun							
1024.	1.03.910248	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL	Peraturan	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1025.	1.03.910250	Peta Kerawanan Bencana Daerah	Dokumen	Peta Kerawanan Bencana Daerah adalah peta tematik untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya yang disusun oleh BPBD untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1026.	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi	3496	3496	3310	3369	3419	3496	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1027.	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data	0	14947	15134	15426	15717	16057	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.							Kawasan Permukiman
1028.	1.04.000006	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan	4	12	21	1	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1029.	1.04.000007	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik	4	12	21	1	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1030.	1.04.000008	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1031.	1.04.000009	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1032.	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1033.	1.04.000024	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1034.	1.04.000038	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum							Rakyat dan Kawasan Permukiman
1035.	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan	0	0	5	4	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.							
1036.	1.04.000061	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1037.	1.04.000063	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang memuat: 1. Data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak Sarusun 2. Pembentukan Panitia Musyawarah 3. Hasil Sosialisasi 4. Hasil Musyawarah pembentukan PPPSRS 5. Susunan Organisasi PPPSRS	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1038.	1.04.000065	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	1	12	12	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1039.	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.							Rakyat dan Kawasan Permukiman
1040.	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1041.	1.04.000106	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				konsultasi terhadap pengurus P3SRS							
1042.	1.04.000110	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1043.	1.04.000111	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1044.	1.04.000115	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	0	19	27	34	34	38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1045.	1.04.000116	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	21	21	21	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1046.	1.04.000124	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD	0	0	1626,02	1626,02	1626,02	1626,02	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.							Kawasan Permukiman
1047.	1.04.000126	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. Kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. Kawasan negative list perumahan, dan 3. Kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1048.	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	0	0	150	520	110	162	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1049.	1.04.000146	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	0	0	50	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1050.	1.04.000168	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	4	12	21	1	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1051.	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1052.	1.04.000193	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.	1539	79	907	737	1400	681	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kawasan Permukiman
1053.	1.04.000212	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	Jumlah UPT rumah susun yang dikelola	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1054.	1.04.000216	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	0	3	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1055.	1.04.000217	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	0	2	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1056.	1.04.000218	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	1	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1057.	1.04.000219	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1058.	1.04.000235	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kawasan Permukiman
1059.	1.04.000236	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.	0	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1060.	1.04.000246	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. Kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. Kawasan negative list perumahan, dan 3. Kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1061.	1.04.000251	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kab/kota	0	2	0	0	0	8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1062.	1.04.000259	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten/kota	0	1	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1063.	1.04.000264	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan	Unit	Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian.	9	2	5	5	10	5	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Prasarana antara lain: a. Jaringan jalan b. Sistem penyediaan air minum c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. Saluran pembuangan air limbah e. Sistem pengelolaan persampahan f. Sistem proteksi kebakaran.							Kawasan Permukiman
1064.	1.04.000271	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah	0	9	10	68	16	15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1065.	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.	0	4693	4693	4693	4693	4693	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1066.	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan	0	4693	4693	4693	4693	4693	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.							
1067.	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survei sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survei primer	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1068.	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0	0	271	271	271	271	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1069.	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	0	0	38920	38920	38920	38920	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1070.	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survei sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survei primer	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1071.	1.04.000280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0	0	1577	955	759	1053	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1072.	1.04.000281	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki oleh daerah	42	58	129	80	182	160	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1073.	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.	0	15	79	49	52	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1074.	1.04.000285	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.	0	0	1	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1075.	1.04.000286	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir,	0	0	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				serta pelayanan umum dan pemerintahan.							
1076.	1.04.000289	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang menunjang fungsi hunian dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1077.	1.04.000290	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1078.	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.	0	0	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1079.	1.04.000305	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kab/kota yang menjelaskan: 1. Jumlah unit rumah atau penerima bantuan yang terdampak 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Progres pelaksanaan pembangunan	0	1	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1080.	1.04.000309	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam	0	0	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. Penghunian sementara untuk masyarakat c. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. Pendataan masyarakat e. Penyusunan rencana dan f. Musyawarah dan diskusi penyepakatan.&							Kawasan Permukiman
1081.	1.04.000314	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Ha	Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	0	0	23,59	16,72	8,54	11,43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1082.	1.04.000318	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik	0	2	0	0	0	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH							
1083.	1.04.000323	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	340	226	131	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1084.	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	114	95	21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1085.	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)		0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1086.	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	0	0	20	18	16	Satuan Polisi Pamong Praja
1087.	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh wali data bencana yang disediakan secara bersama ataupun mandiri sebagai hasil	0	0	0	0	1	1	Badan Penanggulang-an Bencana Daerah (BPBD)

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota							
1088.	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1089.	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1090.	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan	0	0	0	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran							
1091.	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1092.	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1093.	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat	0	0	0	250 Orang	12	12	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi, dll). Aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB							
1094.	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana	0	0	0	250 Orang	12	12	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi, dll). Aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB							
1095.	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	2	2	1	BPBD
1096.	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang-an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	0	0	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1097.	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	0	0	0	2	3	3	BPBD
1098.	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen	0	0	0	0	0	2	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah							
1099.	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1100.	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutakhirkan oleh Kab/Kota	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1101.	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	0	0	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1102.	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data	Dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diprasyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan							
1103.	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1104.	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1105.	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasarkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun mandiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta	0	0	0	0	0	1	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota							
1106.	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	6	6	6	Satuan Polisi Pamong Praja
1107.	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	0	0	0	0	4	Satuan Polisi Pamong Praja
1108.	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	0	0	0	0	1785	Satuan Polisi Pamong Praja
1109.	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1110.	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1111.	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1112.	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1113.	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1114.	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui penyuluhan/Sosialisasi	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1115.	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	1842	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1116.	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	21	21	BPBD
1117.	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	0	0	0	12 jenis	1.553	105	BPBD
1118.	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	0	0	0	12 jenis	1.553	105	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1119.	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1120.	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1121.	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1122.	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1123.	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	Sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1124.	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	Sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1125.	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1126.	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1127.	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1128.	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1129.	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	950	950	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya									
1130.	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	950	950	BPBD
1131.	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	0	0	0	0	0	27	BPBD
1132.	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak	0	0	0	0	0	27	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar							
1133.	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	23	15	Satuan Polisi Pamong Praja
1134.	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	0	0	0	0	0	45	Satuan Polisi Pamong Praja
1135.	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini	0	0	0	0	0	140	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat							
1136.	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten. Kota	0	0	0	370	25	8 Kawasan	BPBD
1137.	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk memperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	370	25	8 Kawasan	BPBD
1138.	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang	0	0	0	0	0	4	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana							
1139.	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	0	0	0	0	1	1	BPBD
1140.	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1141.	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1142.	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1143.	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1144.	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
1145.	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelanggaran Perda	0	0	1	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1146.	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1147.	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1148.	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/mou/PKS/Nota Kesepakatan	0	0	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1149.	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1150.	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1151.	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	12	12	12	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1152.	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	0	0	0	12	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1153.	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1154.	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	7	7	21	Satuan Polisi Pamong Praja
1155.	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	0	0	12	Satuan Polisi Pamong Praja
1156.	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan ketertiban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan	0	0	0	0	0	1	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan							
1157.	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tindakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	0	0	0	0	0	1842	Satuan Polisi Pamong Praja
1158.	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b.	0	0	0	0	0	4	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan fasilitas umum, aset daerah, rumah ibadah dll							
1159.	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	0	0	0	0	0	1	BPBD
1160.	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	0	0	0	0	21	21	BPBD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.							
1161.	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	140	Satuan Polisi Pamong Praja
1162.	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	12	12	12	12	12	12	BPBD
1163.	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	11	1	1	1	2	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1164.	1.06.000008	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	10	11	1	1	2	2	Dinas Sosial
1165.	1.06.000009	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	10	11	9	1	1	1	Dinas Sosial
1166.	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	10	11	4	1	1	2	Dinas Sosial
1167.	1.06.000020	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	11	2	3	4	2	Dinas Sosial
1168.	1.06.000021	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10	11	2	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1169.	1.06.000022	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	11	1	1	1	2	Dinas Sosial
1170.	1.06.000023	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	10	11	3	1	8	8	Dinas Sosial
1171.	1.06.000024	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	10	11	1	1	2	2	Dinas Sosial
1172.	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	10100	11100	11330	10650	10610	9860	Dinas Sosial
1173.	1.06.000034	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke	2	2	5	6	3	2	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)							
1174.	1.06.000038	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2	2	1	1	1	1	Dinas Sosial
1175.	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	2	2	2	1	1	Dinas Sosial
1176.	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	2	2	5	2	18	3	Dinas Sosial
1177.	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2	2	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1178.	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	2	2	5	22	2	9	Dinas Sosial
1179.	1.06.000043	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2	2	2	17	15	9	Dinas Sosial
1180.	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	2	2	4	22	6	8	Dinas Sosial
1181.	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	2	2	5	22	7	7	Dinas Sosial
1182.	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH	3163	3251	3148	3646	3304	5664	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan							
1183.	1.06.000067	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial	32	32	30	25	27	27	Dinas Sosial
1184.	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	2	61	1	1	1	1	Dinas Sosial
1185.	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	2	61	50	13	20	13	Dinas Sosial
1186.	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	2	61	53	50	80	60	Dinas Sosial
1187.	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap	2	61	1204	668	20	13	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				saji dalam masa tanggap darurat							
1188.	1.06.000074	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	54	86	2	5	1	1	Dinas Sosial
1189.	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	54	86	113	125	125	130	Dinas Sosial
1190.	1.06.000081	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	54	86	2	21	5	21	Dinas Sosial
1191.	1.06.000083	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	54	86	20	20	3	5	Dinas Sosial
1192.	1.06.000084	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk	54	86	1	1	3	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak							
1193.	1.06.000085	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	54	86	1	2	1	1	Dinas Sosial
1194.	1.06.000086	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	54	86	6	2	7	5	Dinas Sosial
1195.	1.06.000087	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	54	86	2	1	1	1	Dinas Sosial
1196.	1.06.000088	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	54	86	2	8	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1197.	1.06.000089	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1198.	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	9	9	9	8	9	7	Dinas Sosial
1199.	1.06.000093	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1200.	1.06.000094	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	77	24	50	120	103	101	Dinas Sosial
1201.	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial							
1202.	1.06.000098	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1203.	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	44	44	44	44	44	44	Dinas Sosial
1204.	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari							
1205.	1.06.000102	Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1206.	1.06.000110	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan	3	2	1	4	11	10	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi							
1207.	1.06.000111	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	3	2	5	4	1	11	Dinas Sosial
1208.	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	3	2	10	16	4	4	Dinas Sosial
1209.	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	2	10	3	1	18	Dinas Sosial
1210.	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3	2	10	8	5	3	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1211.	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3	2	10	9	1	56	Dinas Sosial
1212.	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	3	2	10	59	82	7	Dinas Sosial
1213.	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3	2	1	1	1	2	Dinas Sosial
1214.	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	3	2	1	4	2	10	Dinas Sosial
1215.	1.06.000122	Penyandang Disabilitas Terlantar yang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang	3	2	10	13	1	17	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga		mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya							
1216.	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	8	10	10	12	10	4	Dinas Sosial
1217.	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	10	10	10	10	10	Dinas Sosial
1218.	1.06.000133	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan	5	4	4	4	2	3	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya							
1219.	1.06.000136	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	2	2	2	5	10	18	Dinas Sosial
1220.	1.06.000137	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	2	2	2	2	5	8	Dinas Sosial
1221.	1.06.000138	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	5	5	5	5	10	3	Dinas Sosial
1222.	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar	5	5	5	5	10	25	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		menerima kebutuhan sandang		panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah							
1223.	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	3	3	3	3	3	3	Dinas Sosial
1224.	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	32	32	30	25	27	27	Dinas Sosial
1225.	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	3	3	3	3	3	3	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1226.	1.06.000180	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.	5	5	4	4	4	5	Dinas Sosial
1227.	1.06.000183	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi,	1	1	1	1	184	918	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.							
1228.	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1229.	1.06.000185	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	1	25	Dinas Sosial
1230.	1.06.000186	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti	1	1	1	1	2	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis							
1231.	1.06.000187	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	20	21	Dinas Sosial
1232.	1.06.000188	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial
1233.	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	17	11	20	3	5	9	Dinas Sosial
1234.	1.06.000192	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup	1	120	80	71	71	75	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.							
1235.	1.06.000193	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.	134	139	70	10	42	122	Dinas Sosial
1236.	1.06.000195	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.							
1237.	1.06.000199	Anak yang ter fasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan.	2	3	3	2	1	4	Dinas Sosial
1238.	1.06.000201	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
1239.	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan	Orang	Penyelenggaraan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		bencana pada masyarakat di lokasi rawan		pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD Urusan							
1240.	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin	1	1	1	150	120	225	Dinas Sosial
1241.	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat	32	32	30	25	27	27	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah							
1242.	1.06.000212	Orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.	950	957	966	969	976	983	Dinas Sosial
1243.	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan,	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.							
1244.	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	Jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	79443	78445	79603	77808	87176	86046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1245.	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Pengusaha: a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan	4	4	6	6	5	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bukan c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.							
1246.	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan	240	55	60	210	237	278	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia							
1247.	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	5	5	5	7	8	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1248.	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	2	3	3	3	4	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1249.	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1250.	2.07.000042	LPKS yang dibina	Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang	32	28	28	26	27	26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja							dan Tenaga Kerja
1251.	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	0	137	92	365	430	320	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1252.	2.07.000048	Mediator	Orang	PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0	0	0	1	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1253.	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraannya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	0	0	0	6	8	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1254.	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan	0	150	150	150	150	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki							
1255.	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja	383	141	212	289	577	655	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1256.	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja	240	75	212	210	541	362	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan							
1257.	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	383	141	212	289	577	655	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1258.	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	30	0	0	0	50	55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1259.	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	Jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun	79443	78445	79603	77808	87176	86046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau lebih yang disebut juga tenaga kerja							Menengah dan Tenaga Kerja
1260.	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	1	0	3	0	4	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1261.	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	2	0	3	0	5	3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1262.	2.07.000084	Perusahaan Kecil	Perusahaan	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung	325	200	210	220	147	179	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008							
1263.	2.07.000086	Perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar	Perusahaan	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian	325	200	210	220	147	179	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.							
1264.	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	130	135	150	158	135	138	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1265.	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	0	0	0	230	242	252	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1266.	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang	0	0	0	2	2	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antar kerja							dan Tenaga Kerja
1267.	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	240	55	60	210	237	278	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1268.	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	7	7	8	4	8	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1269.	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4673	4826	5342	4574	4057	5832	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1270.	2.08.000001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman	1	1	1	1	2	2	Dinas Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
1271.	2.08.000002	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan	31	17	21	18	30	29	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		mendapatkan layanan pengaduan		korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi							
1272.	2.08.000003	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	2500	1500	500	500	500	750	DP3AP2KB
1273.	2.08.000005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1274.	2.08.000006	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1275.	2.08.000008	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	Meliputi : 1. Penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. Pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1276.	2.08.000009	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	2	2	3	3	2	5	DP3AP2KB
1277.	2.08.000012	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1278.	2.08.000013	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1279.	2.08.000015	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota	2	2	3	3	2	5	DP3AP2KB
1280.	2.08.000017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1281.	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran,	2	2	2	4	2	6	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota							
1282.	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG	5	5	6	6	6	6	DP3AP2KB
1283.	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota	0	0	0	0	5	4	DP3AP2KB
1284.	2.08.000023	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	6	6	6	6	6	4	DP3AP2KB
1285.	2.08.000024	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajemen kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	2	1	1	1	3	4	DP3AP2KB
1286.	2.08.000025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1287.	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota	1	1	1	1	6	1	DP3AP2KB
1288.	2.08.000028	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1289.	2.08.000029	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	36	13	15	24	32	29	DP3AP2KB
1290.	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	17	12	16	15	18	16	DP3AP2KB
1291.	2.08.000032	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		mendapat advokasi dan pendampingan		kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA							
1292.	2.08.000034	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. Lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota.	3	3	3	4	4	4	DP3AP2KB
1293.	2.08.000036	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1294.	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan	5	5	5	5	10	10	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				gender dan pemenuhan hak anak							
1295.	2.08.000039	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	5	5	5	5	10	10	DP3AP2KB
1296.	2.08.000041	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat dilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1297.	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerja sama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1298.	2.08.000043	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				saran/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota.							
1299.	2.08.000044	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	Kegiatan kerja sama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerja sama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1300.	2.08.000047	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB
1301.	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	29	29	29	29	30	30	DP3AP2KB
1302.	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah							
1303.	2.08.000054	Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	26	16	22	9	15	16	DP3AP2KB
1304.	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1014	1014	1014	1014	1296	1014	DP3AP2KB
1305.	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	0	42	64	42	42	42	DP3AP2KB
1306.	2.08.000059	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas	Orang	Pelatihan yang diberikan kepada SDM lembaga penyedia	0	0	0	0	30	30	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas		layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota.							
1307.	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	2	2	2	5	47	38	DP3AP2KB
1308.	2.09.000030	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1309.	2.09.000053	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi	0	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.							Pangan dan Pertanian
1310.	2.09.000068	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan.	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1311.	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	Data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	0	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1312.	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS							
1313.	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1314.	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1315.	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1316.	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021							Pangan dan Pertanian
1317.	2.09.000109	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1318.	2.09.000114	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung.	60	60	75	75	75	75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1319.	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala							
1320.	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan	0	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1321.	2.09.000144	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota	0	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1322.	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	0	0	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1323.	2.09.000155	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1324.	2.09.000159	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan	Dokumen	Merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.							Pangan dan Pertanian
1325.	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1326.	2.09.000190	Data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	Data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1327.	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1328.	2.11.000001	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1329.	2.11.000004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	63,12	66,52	61,75	62,5	67,58	64,94	Dinas Lingkungan Hidup
1330.	2.11.000005	Data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas	239	239	239	239	233	233	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu							
1331.	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1332.	2.11.000007	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1333.	2.11.000009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1334.	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1335.	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1336.	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	A. Tersedianya data hasil validasi klhs yang mendukung dokumen klhs rencana tata ruang b. Tersedianya data hasil validasi klhs yang mendukung dokumen krp lainnya	0	0	1	0	1	3	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1337.	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1338.	2.11.000014	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1339.	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1340.	2.11.000018	Data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1341.	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1342.	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	A. Tersedianya data pengkajian pengaruh krp terhadap kondisi lh yang mendukung dokumen klhs rencana tata ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh krp terhadap kondisi lh yang mendukung dokumen klhs krp lainnya	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1343.	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait	239	239	239	239	233	233	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu							
1344.	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1345.	2.11.000023	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. Tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	1	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1346.	2.11.000024	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup	0	1	0	1	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
1347.	2.11.000026	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku	1	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1348.	2.11.000028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1349.	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1350.	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1351.	2.11.000033	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1. Jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. Jumlah kebijakan yang telah disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1352.	2.11.000034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. Jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. Jumlah kebijakan yang disusun 3. Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1353.	2.11.000037	Dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1. Jumlah kajian kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST 2. Data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. Tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST							
1354.	2.11.000039	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1355.	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1356.	2.11.000044	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	3	27	30	9	4	5	Dinas Lingkungan Hidup
1357.	2.11.000046	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	Tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1358.	2.11.000049	Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	3	4	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1359.	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1360.	2.11.000051	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.	3	27	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1361.	2.11.000052	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan	3	27	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							
1362.	2.11.000056	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	30	9	4	5	Dinas Lingkungan Hidup
1363.	2.11.000058	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	0	0	30	9	4	5	Dinas Lingkungan Hidup
1364.	2.11.000060	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1365.	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0	0	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1366.	2.11.000063	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1367.	2.11.000066	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1368.	2.11.000067	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah							
1369.	2.11.000068	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1. Jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. Jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. Tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. Tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup
1370.	2.11.000069	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1371.	2.11.000070	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	1. Tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. Tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. Tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. Tersedianya	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya							
1372.	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1373.	2.11.000075	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1374.	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	0	13	7	2	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1375.	2.11.000078	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	12	26	38	40	54	94	Dinas Lingkungan Hidup
1376.	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan							
1377.	2.11.000081	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1378.	2.11.000083	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1379.	2.11.000084	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1380.	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	0	13	7	2	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengadilan atau melalui Pengadilan		di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan							
1381.	2.11.000090	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1382.	2.11.000092	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	1	1	1	1	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
1383.	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.							
1384.	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	A. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. B. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1385.	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.							
1386.	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1387.	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1388.	2.11.000100	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1389.	2.11.000102	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1390.	2.11.000104	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud	3	4	0	12	3	4	Dinas Lingkungan Hidup
1391.	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1392.	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1393.	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
1394.	2.11.000108	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1395.	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan rehabilitasi melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1396.	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1397.	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1398.	2.11.000113	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1399.	2.11.000114	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	Data lokasi proklim di kabupaten/kota	1	8	5	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup
1400.	2.11.000116	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	Dinas Lingkungan Hidup
1401.	2.11.000118	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	520,17	520,17	529,96	529,96	529,96	529,96	Dinas Lingkungan Hidup
1402.	2.11.000120	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1403.	2.11.000122	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1404.	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreativitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	200	200	300	300	400	400	Dinas Lingkungan Hidup
1405.	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH		dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH							
1406.	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1407.	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
1408.	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	55,33	56,32	51,58	59,73	67,78	56,11	Dinas Lingkungan Hidup
1409.	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	63,12	66,52	61,75	62,5	67,58	64,94	Dinas Lingkungan Hidup
1410.	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	54,23	54,23	38,52	23,96	33,51	34,13	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1411.	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	82,77	82,63	83,76	85,9	85,83	89,79	Dinas Lingkungan Hidup
1412.	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	200	200	300	300	400	400	Dinas Lingkungan Hidup
1413.	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	1	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1414.	2.11.000139	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1415.	2.11.000140	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1416.	2.11.000141	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1417.	2.11.000142	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1418.	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	Data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	0	0	30	9	4	12	Dinas Lingkungan Hidup
1419.	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	Persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	0	30	9	4	12	Dinas Lingkungan Hidup
1420.	2.11.000150	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	Data rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1421.	2.11.000151	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1422.	2.11.000152	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1423.	2.11.000153	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	13	13	13	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
1424.	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	13	13	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1425.	2.11.000156	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	1. Tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. Tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. Tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pemilahan sampah	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
1426.	2.11.000158	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. Tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. Tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. Tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pengangkutan sampah	13	13	12	12	10	10	Dinas Lingkungan Hidup
1427.	2.11.000159	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	2	3	4	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
1428.	2.11.000160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. Tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. Tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. Tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pengumpulan sampah	179	179	179	206	228	228	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1429.	2.11.000161	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1430.	2.11.000163	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1431.	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1432.	2.11.000167	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1433.	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1434.	2.11.000172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	1. Tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. Tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	23.753,67	25.069,05	26.807,66	27.103,54	27.360,80	27.700,94	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1435.	2.11.000174	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	2.494,25	2.510,36	3.334,65	3.720,74	4.390,08	4.548,20	Dinas Lingkungan Hidup
1436.	2.11.000175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1437.	2.11.000176	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	Dinas Lingkungan Hidup
1438.	2.11.000177	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas	20.356,05	20.672,51	21.609,46	22.367,20	22.078,85	22.317,56	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)							
1439.	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1440.	2.11.000181	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup
1441.	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1442.	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1443.	2.11.000189	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan							
1444.	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0	0	0	1	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
1445.	2.11.000192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)	35	35	35	35	39	39	Dinas Lingkungan Hidup
1446.	2.11.000193	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Usaha	Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	30	42	42	Dinas Lingkungan Hidup
1447.	2.11.000205	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1448.	2.11.000207	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1449.	2.11.000208	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1450.	2.11.000209	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1451.	2.11.000211	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1452.	2.11.000213	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1453.	2.11.000215	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.							
1454.	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	0	0	1	0	1	3	Dinas Lingkungan Hidup
1455.	2.11.000218	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	12	26	38	40	54	94	Dinas Lingkungan Hidup
1456.	2.11.000220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1. Jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. Jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1457.	2.11.000221	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1458.	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup							
1459.	2.11.000230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1460.	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1461.	2.11.000232	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1462.	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi							
1463.	2.11.000236	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1464.	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1465.	2.11.000241	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Lokasi	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1466.	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200	200	300	300	400	400	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1467.	2.11.000247	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	13	7	2	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1468.	2.11.000250	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1469.	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	2	1	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1470.	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	2	1	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1471.	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1472.	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	0	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1473.	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1474.	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton		0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1475.	2.11.000257	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara							
1476.	2.11.000259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. Tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)	43	43	43	43	47	47	Dinas Lingkungan Hidup
1477.	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1478.	2.11.000261	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1479.	2.11.000262	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1480.	2.11.000263	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1481.	2.11.000264	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1482.	2.11.000265	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	1. Tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. Tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. Tersedianya data jumlah SDM yang mengoperasionalkan sarana pemilahan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1483.	2.11.000266	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1484.	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	239	239	239	239	233	233	Dinas Lingkungan Hidup
1485.	2.11.000269	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1486.	2.11.000271	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	MÂ²	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1487.	2.11.000273	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1488.	2.11.000275	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1489.	2.11.000277	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1490.	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	55,33Â 82,77Â 54,23Â 63,12	56,32 82,63 54,23 66,52	51,58 83,76 38,52 61,75	59,73 85,9 23,96 62,5	67,78 85,83 33,51 67,58	56,11 89,79 34,13 64,94	Dinas Lingkungan Hidup
1491.	2.11.000280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	1. Tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. Tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. Tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. Tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. Tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. Tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. Tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)	90	90	90	90	90	90	Dinas Lingkungan Hidup
1492.	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1493.	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1494.	2.11.000286	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	1. Tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. Tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan	2.482,18	2.498,29	3.210,32	3.571,73	4.295,14	4.452,38	Dinas Lingkungan Hidup
1495.	2.11.000287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	8,05	8,05	14,83	17,97	17,96	18,10	Dinas Lingkungan Hidup
1496.	2.11.000288	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	Ton	1. Jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	20.356,05	20.672,51	21.609,46	22.367,20	22.078,85	22.317,56	Dinas Lingkungan Hidup
1497.	2.11.000289	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	Ton	1. Tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat	903,37	1.886,18	1.863,55	1.015,60	891,87	835,18	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya		pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton							
1498.	2.11.000290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1. Tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. Tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	21.259, 42	22.558, 69	23.473, 01	23.382, 80	22.970, 72	23.152, 74	Dinas Lingkungan Hidup
1499.	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1500.	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
1501.	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1502.	2.11.000300	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		perundang undangan dan kebutuhan									
1503.	2.11.000301	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1504.	2.11.000302	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	0	0	0	12	3	4	Dinas Lingkungan Hidup
1505.	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1506.	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1507.	2.11.000310	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	0	0	30	35	48	94	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				menjadi objek pengawasan aktif.							
1508.	2.11.000311	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	26	38	40	54	94	Dinas Lingkungan Hidup
1509.	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1510.	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1511.	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1512.	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	0	0	0	12	3	0	Dinas Lingkungan Hidup
1513.	2.11.000319	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	43	43	43	43	47	47	Dinas Lingkungan Hidup
1514.	2.11.000320	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan	0	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
1515.	2.11.000321	Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada	Unit	Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1516.	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	A. Data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. B. Data dan informasi jf plh di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan sarana prasarana (usulan alat pengujian kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1517.	2.11.000323	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia	Unit	Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1518.	2.11.000324	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	Unit	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1519.	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.							
1520.	2.11.000326	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola	Ton	Data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1521.	2.11.000327	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	Tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1522.	2.11.000328	Dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1523.	2.11.000329	Jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	Ton	Tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1524.	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1525.	2.11.000331	Sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1526.	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. Dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1527.	2.11.000335	1. Hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)		keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah							
1528.	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0	0	1	0	1	2	Dinas Lingkungan Hidup
1529.	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1530.	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1531.	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1532.	2.11.000340	Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1533.	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku	Laporan	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan		penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH							
1534.	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1535.	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1536.	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan		Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup							
1537.	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1538.	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1539.	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan,	0	13	7	2	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.							
1540.	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1541.	2.11.000349	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi,	Laporan / Dokumen	Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi,	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis		pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis						
1542.	2.11.000350	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	8,05	8,05	14,83	17,97	17,96	18,10	Dinas Lingkungan Hidup
1543.	2.11.000351	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/pltsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah	23.753,67	25.069,05	26.807,66	27.103,54	27.360,80	27.700,94	Dinas Lingkungan Hidup
1544.	2.11.000352	Jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang	2.482,18	2.498,29	3.210,32	3.571,73	4.295,14	4.452,38	Dinas Lingkungan Hidup
1545.	2.11.000353	Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	Dokumen	Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1546.	2.11.000354	Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah							
1547.	2.11.000355	Jumlah Unit/usaha/swasta /kelompok masyarakat/ lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/ swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah		Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
1548.	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	70,94	74,57	75,19	75,98	76,68	77,44	Dinas Lingkungan Hidup
1549.	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	25.892, 37	27.219, 69	27.442, 53	27.732, 7	27.988, 2	28.263, 78	Dinas Lingkungan Hidup
1550.	2.12.000008	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Kependuduk-an dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK CAPIL)
1551.	2.12.000023	Dokumen Hasil Pencatatan, penata usahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen		4487	3789	5469	4594	31754	4337	DISPENDUK CAPIL

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1552.	2.12.000024	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen		17587	29602	32363	38551	4554	49567	DISPENDUK CAPIL
1553.	2.12.000025	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1554.	2.12.000032	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1555.	2.12.000033	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1556.	2.12.000035	Dokumen kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		3	8	9	15	18	21	DISPENDUK CAPIL
1557.	2.12.000046	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen		2	2	2	2	2	2	DISPENDUK CAPIL
1558.	2.12.000051	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1559.	2.12.000053	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1560.	2.12.000056	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan		0	0	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1561.	2.12.000057	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1562.	2.12.000060	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1563.	2.12.000062	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1564.	2.12.000068	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1565.	2.12.000071	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota									
1566.	2.12.000072	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1567.	2.12.000073	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1568.	2.12.000074	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1569.	2.12.000079	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1570.	2.12.000081	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1571.	2.12.000085	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan		1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL
1572.	2.12.000099	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan	1	1	1	1	1	1	DISPENDUK CAPIL

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penduduk rentan administrasi kependudukan							
1573.	2.12.000100	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak		Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram	1	1	1	1	1	1	DISPENDUKCAPIL
1574.	2.13.000010	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah
1575.	2.13.000034	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
1576.	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi,	0	0	0	0	0	1	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA							
1577.	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	5	5	5	5	5	5	Sekretariat Daerah
1578.	2.14.000001	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	15	10	14	12	15	12	DP3AP2KB
1579.	2.14.000002	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	2	3	3	3	3	DP3AP2KB
1580.	2.14.000003	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah kab/kota yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1581.	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1582.	2.14.000014	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan	Laporan	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		stakeholder/instansi/organisasi									
1583.	2.14.000015	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Laporan	Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	345	345	345	345	345	345	DP3AP2KB
1584.	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1585.	2.14.000018	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	21	21	21	21	21	21	DP3AP2KB
1586.	2.14.000019	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas	1	6	6	6	6	21	DP3AP2KB
1587.	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	6	6	6	6	6	6	DP3AP2KB
1588.	2.14.000024	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1589.	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1590.	2.14.000026	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	Menyusun Profil Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1591.	2.14.000028	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan	Laporan	Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kegagalan Penggunaan MKJP		penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP							
1592.	2.14.000029	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1593.	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	120	120	120	120	120	120	DP3AP2KB
1594.	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	15	15	15	15	15	15	DP3AP2KB
1595.	2.14.000036	Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	345	345	345	345	345	345	DP3AP2KB
1596.	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk							
1597.	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	6	6	6	10	10	21	DP3AP2KB
1598.	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	6	6	6	10	10	21	DP3AP2KB
1599.	2.14.000042	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1600.	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	68	68	68	68	68	68	DP3AP2KB
1601.	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha	68	68	68	68	68	68	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).							
1602.	2.14.000047	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	68	68	68	68	68	68	DP3AP2KB
1603.	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1604.	2.14.000049	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	25	25	25	25	25	23	DP3AP2KB
1605.	2.14.000050	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1606.	2.14.000051	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)							
1607.	2.14.000052	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
1608.	2.14.000053	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1609.	2.14.000054	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	Daerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	28	28	28	28	28	28	DP3AP2KB
1610.	2.14.000056	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1611.	2.14.000057	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
1612.	2.14.000058	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur	Laporan	Daerah Menghasilkan/ Mengembangkan Materi	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan		Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal							
1613.	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1614.	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10	10	10	10	10	10	DP3AP2KB
1615.	2.14.000064	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	Mengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk							
1616.	2.14.000065	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
1617.	2.14.000066	Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	345	345	345	345	345	345	DP3AP2KB
1618.	2.14.000067	Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	9	9	9	9	9	9	DP3AP2KB
1619.	2.14.000068	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	25	25	25	25	25	25	DP3AP2KB
1620.	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	7	7	7	7	7	7	DP3AP2KB
1621.	2.14.000070	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga	35	35	35	35	35	35	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1622.	2.14.000071	Orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi	9	9	9	9	9	9	DP3AP2KB
1623.	2.14.000072	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana	5	5	5	5	5	5	DP3AP2KB
1624.	2.14.000073	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1625.	2.14.000074	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1626.	2.14.000075	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)							
1627.	2.14.000077	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	Daerah yang IMPnya telah dibina dan daerah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	28	28	28	28	28	28	DP3AP2KB
1628.	2.14.000078	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1629.	2.14.000081	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
1630.	2.14.000086	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1631.	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1632.	2.14.000089	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan		Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan							
1633.	2.14.000090	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1634.	2.14.000091	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1635.	2.14.000094	Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1636.	2.14.000095	Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerja sama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1637.	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1638.	2.14.000104	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah	Sertifikat	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	28	28	28	28	28	28	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan		Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana							
1639.	2.14.000105	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1640.	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1641.	2.14.000108	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6	6	6	6	8	8	DP3AP2KB
1642.	2.14.000109	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1643.	2.14.000110	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1644.	2.14.000112	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
1645.	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal							
1646.	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25	25	25	25	25	23	DP3AP2KB
1647.	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
1648.	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
1649.	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	94	100	114	121	122	122	Dinas Perhubungan
1650.	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi risiko kecelakaan berupa	819	1368	612	660	617	556	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.							
1651.	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi risiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur penghentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan	819	1368	612	660	617	556	Dinas Perhubungan
1652.	2.15.000008	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan	11	11	11	11	11	11	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor							
1653.	2.15.000040	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1654.	2.15.000067	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1655.	2.15.000068	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.							
1656.	2.15.000071	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1657.	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1658.	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.							
1659.	2.15.000077	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	Kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a. penyiapan Denah marka parkir b. luas area	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				parkir dan perhitungan kapasitas parkir c. persetujuan hasil ANDALALIN (apabila diprasyaratkan).							
1660.	2.15.000080	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab/ b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab/ d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab/Kota setiap Trayek.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1661.	2.15.000085	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan							

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan dan c. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.							
1662.	2.15.000086	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara	4	2	2	2	3	0	Dinas Perhubungan
1663.	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk							
1664.	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
1665.	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	0	0	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
1666.	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	8	13	2	1	1	3	Dinas Perhubungan
1667.	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).							
1668.	2.15.000125	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1669.	2.15.000126	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1670.	2.15.000127	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1671.	2.15.000130	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen		1	3	1	0	0	0	Dinas Perhubungan
1672.	2.15.000131	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen		0	0	0	1	1	1	Dinas Perhubungan
1673.	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1674.	2.15.000144	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1675.	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1676.	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1677.	2.15.000176	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1678.	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.							
1679.	2.15.000187	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1680.	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	4	2	2	2	4	4	Dinas Perhubungan
1681.	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan
1682.	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan							
1683.	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	1704	1753	1890	1890	1899	1899	Dinas Perhubungan
1684.	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	1704	1753	1890	1890	1899	1899	Dinas Perhubungan
1685.	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1686.	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang	123755	123755	123755	123755	123755	123755	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas							
1687.	2.15.000246	Data identifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1688.	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1689.	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan	4	2	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur							
1690.	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.							
1691.	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengendali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	4	4	4	4	7	7	Dinas Perhubungan
1692.	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun							
1693.	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	104	104	104	104	104	104	Dinas Perhubungan
1694.	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
1695.	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalan-jalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman	5538	5538	5538	5566	5716	5777	Dinas Perhubungan
1696.	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1697.	2.15.000320	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1698.	2.15.000321	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1699.	2.15.000322	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1700.	2.15.000403	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1701.	2.15.000406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1702.	2.15.000408	Data penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1703.	2.15.000409	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
1704.	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	26	26	26	26	26	26	Dinas Perhubungan
1705.	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a.	14	14	14	14	14	14	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.							
1706.	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Perhubungan
1707.	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1708.	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	2	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1709.	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	339	354	364	369	397	403	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1710.	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang	0	0	0	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah							
1711.	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arsitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan	0	0	0	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah							
1712.	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	0	0	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1713.	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang	0	0	0	2	0	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah							
1714.	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.	16	16	73	54	54	9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1715.	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data	3083	3094	3094	3356	3356	3384	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain							
1716.	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	0	0	0	9	22	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1717.	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -	0	0	4	4	5	5	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.							Informatika dan Statistik
1718.	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	0	0	0	4	4	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1719.	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1720.	2.16.000083	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	0	30	30	30	30	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1721.	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	0	0	0	0	9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1722.	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah							
1723.	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo	0	0	0	0	0	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1724.	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	0	1000	1000	1500	2000	2000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1725.	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	30	30	30	30	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1726.	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	30	30	30	30	36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1727.	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain.	0	650	650	650	651	651	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1728.	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi	0	0	0	0	0	106	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain							
1729.	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	0	22	25	27	30	35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1730.	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	1	2	2	2	2	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1731.	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda - Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua	26	29	33	36	38	40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.							
1732.	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik	10	10	10	10	10	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.							
1733.	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	92	95	99	102	104	106	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1734.	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	0	2	2	2	3	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1735.	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	6	9	9	10	10	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1736.	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	30	33	40	42	45	48	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1737.	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1738.	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)	121	187	197	291	334	344	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1739.	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)	0	1	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1740.	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output	3	134	468	488	498	508	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1741.	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1742.	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- Jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	0	0	0	0	0	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1743.	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	54	66	66	67	70	79	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1744.	2.16.000108	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program	1	2	2	2	6	6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.							
1745.	2.16.000109	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas - Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara, metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	21	28	35	36	59	59	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1746.	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,	100050	111655	113411	123042	148136	167694	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.							
1747.	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	0	0	2	2	3	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1748.	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	0	0	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1749.	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	1329	1093	890	720	1015	1040	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1750.	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar	36	14	13	9	143	157	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara							
1751.	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnya media resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	102	116	75	110	78	131	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1752.	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnya media resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	4	4	4	4	4	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1753.	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan	0	0	0	0	0	257	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]							
1754.	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	0	0	0	1	2	12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1755.	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola - Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang dimaksud adalah laporan kasus	0	0	0	0	0	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1756.	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangkapan kamera	23130	25890	27180	22800	27960	26040	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1757.	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah	1554	3013	2512	2612	401	638	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya							Informatika dan Statistik
1758.	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	0	1056	800	1022	1166	1087	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1759.	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan	87	624	726	564	483	494	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1760.	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	1672	2326	2700	2158	2174	1732	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1761.	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi	0	0	0	8	6	5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1762.	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	0	30	35	35	35	35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1763.	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	0	0	0	72	80	96	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1764.	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain -Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	0	0	0	0	0	129	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1765.	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	0	0	0	0	0	129	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1766.	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak	0	0	0	0	0	2067	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah							
1767.	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	- Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka	0	0	0	0	56325	113973	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1768.	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.	0	0	0	0	0	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1769.	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Informatika dan Statistik
1770.	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	4	38	38	38	45	61	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1771.	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di seluruh Perangkat Daerah Pemda	6	10	20	114	110	116	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1772.	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.	0	0	0	0	60	71	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1773.	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	0	0	0	0	60	71	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1774.	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.	1	1	3	5	21	21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1775.	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	0	0	0	0	126	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1776.	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	0	46	46	71	116	205	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1777.	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah – Informasi serta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban	0	0	0	0	12	14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.							
1778.	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	0	0	1	65	100	92	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1779.	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	21	21	21	21	23	28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1780.	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	0	0	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1781.	2.16.000158	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota	0	3	3	3	24	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1782.	2.17.000001	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal wilayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu							
1783.	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1784.	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1785.	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1786.	2.17.000007	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1787.	2.17.000008	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1788.	2.17.000010	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1789.	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	99	73	111	109	105	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1790.	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	99	73	111	109	105	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1791.	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1792.	2.17.000021	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan	99	73	111	109	105	79	Dinas Pekerjaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020							Umum dan Penataan Ruang
1793.	2.17.000022	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.	99	73	111	109	105	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1794.	2.17.000023	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1795.	2.17.000024	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1796.	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kewenangan Kabupaten/Kota		kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.							Penataan Ruang
1797.	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1798.	2.17.000027	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1799.	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1800.	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1801.	2.17.000030	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1802.	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1803.	2.17.000033	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.	300	300	250	250	200	200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1804.	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	185	174	105	95	416	265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1805.	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang	246	252	260	268	275		Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil							Penataan Ruang
1806.	2.17.000039	Unit usaha mikro yang ter fasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	175	175	175	175	175	175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1807.	2.17.000045	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Unit Usaha	Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1808.	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.							Penataan Ruang
1809.	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1810.	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	99	73	111	109	105	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1811.	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.							
1812.	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	68	68	83	118	161	326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1813.	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	96	96	96	96	96	109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1814.	2.17.000056	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi	150	150	140	140	130	130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.							
1815.	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Di mana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	100	100	216	368	400	300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
1816.	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.	100	100	216	368	400	300	DPMPTSP
1817.	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&							
1818.	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1819.	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1820.	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan	4	3	2	2	2	14	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.							
1821.	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP
1822.	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP
1823.	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L)	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.							
1824.	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP
1825.	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1826.	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1827.	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penanaman modal di daerah;		diatur dengan peraturan daerah.							
1828.	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1829.	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1830.	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1831.	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.							
1832.	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	6	8	8	10	10	18	DPMPTSP
1833.	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP
1834.	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1835.	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berusaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP
1836.	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi penggunaan kalimat Non Perizinan	2370	1605	1715	2064	2542	1136	DPMPTSP
1837.	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	276	350	461	1744	3961	3409	DPMPTSP
1838.	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	1	1	1	1	1	1	DPMPTSP

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1839.	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	30	30	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1840.	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	30	30	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1841.	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	Wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya	30	30	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1842.	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	3	3	6	6	6	6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1843.	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	20	30	30	30	30	30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1844.	2.19.000070	Sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1845.	2.19.000071	Organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	2	2	2	2	2	2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1846.	2.19.000072	Sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	1	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1847.	2.19.000073	Atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	50	80	80	80	80	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1848.	2.19.000075	Atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	15	15	20	23	25	45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1849.	2.19.000076	Kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	2	1	2	1	2	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1850.	2.19.000078	Kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	3	3	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1851.	2.19.000081	Pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	150	150	152	164	164	164	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1852.	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	30	30	38	38	38	38	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1853.	2.19.000083	Wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	15	15	18	19	20	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1854.	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	60	60	80	80	80	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1855.	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	19	19	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1856.	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	19	19	20	20	20	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1857.	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	5	5	6	6	6	6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1858.	2.19.000088	Prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1859.	2.19.000089	Organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	6	6	8	8	8	8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1860.	2.19.000090	Tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. B. C. Dan d. Instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	480	480	500	500	500	500	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1861.	2.19.000091	Kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	14	14	16	16	16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1862.	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1863.	2.20.000020	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Badan Pusat Statistik tentang Standar Data							Informatika dan Statistik
1864.	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang menggunakan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data Indonesia tingkat pusat.	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1865.	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1866.	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik	0	0	70	80	90	95	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sektoral yang dimasukkan ke dalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.							
1867.	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1868.	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	250	300	310	320	372	400	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1869.	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.	250	300	310	320	372	400	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1870.	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan,	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan,	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.							Informatika dan Statistik
1871.	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.	5	5	6	8	9	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1872.	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.	2	4	5	8	9	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1873.	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	0	0	30	35	55	82	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1874.	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata,	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk		kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi							
1875.	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.	0	0	70	80	90	95	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1876.	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1877.	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna	80	81	82	84	85	86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				data yang mengakses portal data pemda							
1878.	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	0	0	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1879.	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1880.	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan	0	0	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.							
1881.	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	0	0	70	80	90	95	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1882.	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	0	0	24	27	43	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1883.	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	0	0	1	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1884.	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi,

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		Pemerintah Daerah yang Ditetapkan							Informatika dan Statistik
1885.	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0	1	0	6	8	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1886.	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	20	20	20	20	30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1887.	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	20	20	20	20	30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1888.	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	6	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1889.	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.	0	1	1	1	3	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1890.	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1891.	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1892.	2.22.000018	Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Informasi : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1893.	2.22.000069	Laporan Pembinaan Pranata Tradisional	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.	0	5	6	7	8	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1894.	2.22.000072	Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.	0	5	6	7	8	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1895.	2.22.000075	Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional	Laporan	- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi	0	5	6	7	8	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.							
1896.	2.22.000113	Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	40%	40%	50%	60%	70%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1897.	2.22.000114	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat	0	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan							
1898.	2.22.000115	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	0	59	61	63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1899.	2.22.000117	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1900.	2.22.000124	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1901.	2.22.000125	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1902.	2.22.000126	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan	Objek	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1903.	2.22.000185	Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk	0	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.							
1904.	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab/Kota. Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. PPKD disusun dengan tahapan: 1. Perencanaan 2. Konsolidasi data 3. Pengolahan data 4. Analisis atas hasil pengolahan data 5. Penyusunan naskah 6. Penetapan PPKD	0	1	0	0	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1905.	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.	1	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1906.	2.23.000096	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, slims, atau sejenisnya)	1	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1907.	2.23.000097	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. Eprints, dspace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1908.	2.23.000098	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1909.	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan,	70	70	71	72	72	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.							
1910.	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.	25	25	27	26	26	26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1911.	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.	0	0	0	0	3	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1912.	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	43809	20518	9546	55606	64202	117060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1913.	2.23.000104	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1914.	2.23.000105	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	153131	61891	14396	64576	78603	92267	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1915.	2.23.000106	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	115776	24106	32801	47793	46154	44956	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1916.	2.23.000108	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	0	0	0	793	793	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1917.	2.23.000109	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota	7137	8731	10196	12238	12999	14141	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1918.	2.23.000110	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota							
1919.	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	125895	121104	107502	118179	104881	94028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1920.	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	40076	24556	25090	24255	30086	39014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1921.	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	10000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang berada di wilayah kabupaten/kota							
1922.	2.23.000116	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab/kota	0	0	84	96	113	119	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1923.	2.23.000119	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota	17	18	18	20	21	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1924.	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	6	6	2	2	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1925.	2.23.000121	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1926.	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	90	77	72	67	123	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1927.	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di	0	53	54	58	51	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)							
1928.	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1929.	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota	6	6	8	11	12	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1930.	2.23.000127	Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten/Kota							
1931.	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1932.	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota							
1933.	2.23.000131	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1934.	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	321	112	318	484	544	424	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1935.	2.23.000133	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1936.	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	22709	18340	16066	17320	16484	16776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1937.	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	10920	10398	11721	11762	10887	12431	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1938.	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1939.	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	95	95	95	122	122	122	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1940.	2.23.000139	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1941.	2.23.000140	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan	Orang	Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	0	0	0	90	175	165	Dinas Perpustakaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		perpustakaan berbasis inklusi sosial		dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial							dan Kearsipan
1942.	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas	0	0	0	0	3	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1943.	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.	± 21 ML& dan 2000 arsip foto statis	± 22 ML& dan 2070 arsip foto statis, 10 berkas arsip vital	2.07	13	5579	1978	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1944.	2.24.000027	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna	0	0	0	0	150	150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.							
1945.	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	0	0	0	0	450	4500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1946.	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	1	9	9	20	22	45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1947.	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1948.	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1949.	3.25.000065	Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1950.	3.25.000066	Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1951.	3.25.000114	Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1952.	3.25.000115	Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1953.	3.25.000116	Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1954.	3.25.000117	Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1955.	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang	200	200	200	200	200	200	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.							Pangan dan Pertanian
1956.	3.25.000148	Pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	20	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1957.	3.25.000149	Pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	20	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1958.	3.25.000164	Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1959.	3.25.000212	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1960.	3.25.000238	Unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1961.	3.25.004115	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1962.	3.25.004116	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		sektor pemasaran hasil perikanan		perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK							Pangan dan Pertanian
1963.	3.25.004117	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1964.	3.25.004118	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1965.	3.25.004119	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1966.	3.25.004120	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1967.	3.25.004167	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)		dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)							
1968.	3.25.004168	Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1969.	3.25.004174	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat lkan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare)	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1970.	3.25.004189	Pos kesehatan ikan terpadu	Unit	Jumlah pos kesehatan ikan terpadu	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1971.	3.26.000014	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1972.	3.26.000015	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1973.	3.26.000016	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1974.	3.26.000022	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1975.	3.26.000023	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1976.	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	Melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	4	4	4	4	4	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1977.	3.26.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dokumen	Melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1978.	3.26.000031	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1979.	3.26.000032	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang							dan Pariwisata
1980.	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1981.	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1982.	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1983.	3.26.000036	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1984.	3.26.000037	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1985.	3.26.000039	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1986.	3.26.000041	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1987.	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1988.	3.26.000167	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1989.	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	5	5	5	5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1990.	3.26.000172	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1991.	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Destinasi	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan		tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan							dan Pariwisata
1992.	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan	Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan		berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan							dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1993.	3.26.000188	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen	Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1994.	3.26.000193	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1995.	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	17	17	17	17	17	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1996.	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	3	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1997.	3.26.000217	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	20	20	20	20	20	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1998.	3.26.000218	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata	20	20	20	20	20	20	Dinas Kebudayaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan		Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat							dan Pariwisata
1999.	3.26.000225	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	7	7	7	7	7	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2000.	3.26.000226	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	7	7	7	7	7	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2001.	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2002.	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2003.	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2004.	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2005.	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	9	9	9	9	9	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2006.	3.26.000262	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2007.	3.26.000264	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Dokumen	Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2008.	3.26.000268	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB/KOTA. Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RTRW dan RDTR							
2009.	3.26.000291	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	4	4	4	5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2010.	3.26.000293	Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.	20	25	30	40	40	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2011.	3.27.000135	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	Km	panjang usaha tani yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	1.7	2,0	2,9	3,9	3,9	4,3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2012.	3.27.000137	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	Km	Panjang Usaha tani yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0.3	0.3	0,9	1	0	0,4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2013.	3.27.000143	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2014.	3.27.000152	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2015.	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	61591	61761	61591	61591	61591	61761	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2016.	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	61591	61761	61591	61591	61591	61761	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2017.	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2018.	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2019.	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	1000	600	1100	1150	1150	500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2020.	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	61591	61761	61591	61591	61591	61761	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2021.	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	0	0	0	0	0	1145100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2022.	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2023.	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke	734	735	744	750	750	753	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lahan pertanian dan berfungsi baik							Pangan dan Pertanian
2024.	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2025.	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	Jenis obat hewan yang beredar dan digunakan	1000000	1350000	1550000	2300000	2600000	2650000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2026.	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	11	11	19	19	18	17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2027.	3.27.000308	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	55	63	71	79	80	81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2028.	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2029.	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2030.	3.27.000327	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2031.	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2032.	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	18	1	5	3	2	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2033.	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2034.	3.27.000350	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2035.	3.27.000351	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	Banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	2	2	2	2	11	13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2036.	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2037.	3.27.000354	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2038.	3.27.000355	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	Banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2039.	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	Banyaknya izin usaha RPH yang diawasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2040.	3.27.000357	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan	Laporan	Banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan	1	1	9	9	11	14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner		mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi							
2041.	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2042.	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	3	2	9	6	0	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2043.	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	60	105	84	84	42	42	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2044.	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	69	54	58	42	48	45	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2045.	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.							
2046.	3.27.000380	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa	21	21	21	21	21	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2047.	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2048.	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	6	9	10	19	34	39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2049.	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2050.	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	Adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.							
2051.	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	Banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2052.	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	52	53	53	51	49	49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2053.	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	Luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	15	15	15	15	15	15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2054.	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2055.	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2056.	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan	1006	1010	1010	975	939	931	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				angin) dan perubahan variabilitas iklim							
2057.	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	250	250	250	250	250	250	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2058.	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	1.12	0.84	1,3	1,5	1,45	1,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2059.	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	1.12	0.84	1,3	1,5	1,45	1,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2060.	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terserang OPT	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2061.	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2062.	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	16.04	10.92	21,26	6,8	3,92	2,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2063.	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	16.04	10.92	53	6,8	3,92	2,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2064.	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	120	120	115	120	190	145	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2065.	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2066.	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	Banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2067.	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2068.	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan							
2069.	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2070.	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	0	0	0	3	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2071.	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	369	374	389	399	451	527	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2072.	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Kegiatan Penglolaan Pestisida meliputi Pendataan Pestisida yang beredar, Pemberian informasi kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif, serta alternatif ramah lingkungan, pengawasan terhadap distribusi dan memberikan pemahaman kepada petani khususnya dalam membaca	5310	5185	4966	4754	4235	4015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				label agar petani terhindar dari kesalahan dalam penggunaan pestisida							
2073.	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	Kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	2793	2423	1369	1341	1033	1102	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2074.	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	23	23	32	51	61	71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2075.	3.27.000497	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2076.	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2077.	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2078.	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2079.	3.27.000511	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	1	8	8	8	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2080.	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	Banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2081.	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung perkebunan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2082.	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mendukung produktivitas hasil peternakan							Pangan dan Pertanian
2083.	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	21	21	21	21	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2084.	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2085.	3.27.000550	Jumlah Puskeswan yang dibangun	Unit	Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan	0	1	1	1	1	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2086.	3.27.000551	Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2087.	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	0	0	0	0	0	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2088.	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayah yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2089.	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2090.	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	3	3	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2091.	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2092.	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses	426	426	426	426	426	426	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.							
2093.	3.27.000582	Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	1	0	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2094.	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2095.	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persyaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	2183	1979	2719	2419	2404	1025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2096.	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2097.	3.27.000607	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2098.	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian	0	0	0	0	0	303	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya							
2099.	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2100.	3.27.000617	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang diprasyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2101.	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan	0	0	0	0	0	303	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&							
2102.	3.27.000632	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Dosis	Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain	1000	600	1100	1150	1150	500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2103.	3.27.000636	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2104.	3.27.000641	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	Unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	8	8	10	10	21	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2105.	3.30.000001	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar	Agen / Pasar : 12 / 10	Agen / Pasar : 12 / 10	Agen / Pasar : 13 / 10	Agen / Pasar : 14 / 10	Agen / Pasar : 14 / 11	Agen / Pasar : 14 / 11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2106.	3.30.000014	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran	Kegiatan		0	0	0	0	0	10	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik									dan Perdagangan
2107.	3.30.000015	Gudang yang telah terdaftar	Unit	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	13	13	13	13	13	13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2108.	3.30.000019	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2109.	3.30.000023	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2110.	3.30.000024	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan		1	1	1	1	1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2111.	3.30.000025	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2112.	3.30.000044	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi		1	0	0	2	2	0	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perdagangan
2113.	3.30.000045	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan		2	2	2	2	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2114.	3.30.000046	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan		1	1	1	1	2	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2115.	3.30.000047	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan		1	1	1	1	1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2116.	3.30.000049	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit		10	10	10	10	11	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2117.	3.30.000057	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	0	2	2	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2118.	3.30.000058	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	0	0	1	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2119.	3.30.000061	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan							
2120.	3.30.000063	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan		8	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2121.	3.30.000064	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan		8	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2122.	3.30.000065	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan		8	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2123.	3.30.000066	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan		8	21	21	21	21	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2124.	3.30.000067	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha		683	689	694	971	995	1030	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2125.	3.30.000068	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit		0	0	0	12	12	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2126.	3.30.000073	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan		1	1	1	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2127.	3.30.000074	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									dan Perdagangan
2128.	3.30.000079	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2129.	3.30.000080	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan		3	3	4	5	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2130.	3.30.000091	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha		2295	2310	2320	2335	2350	2360	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2131.	3.30.000094	Produk Unggulan Daerah	Produk		0	0	0	0	0	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2132.	3.30.000097	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2133.	3.30.000099	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit		2	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2134.	3.30.000103	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		10	10	10	10	11	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2135.	3.30.000107	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen	Unit		0	0	0	0	0	10	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									dan Perdagangan
2136.	3.31.000002	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2137.	3.31.000004	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan		0	0	1	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2138.	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2139.	3.31.000007	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan		0	0	0	0	3	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2140.	3.31.000008	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2141.	3.31.000009	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan		240	240	240	480	480	480	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2142.	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan		2	3	0	8	11	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2143.	3.31.000015	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan		0	0	0	0	0	1	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Perdagangan
2144.	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan		0	2	4	2	0	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2145.	3.31.000017	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan		0	0	0	0	0	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2146.	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan		0	2	4	2	0	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2147.	3.31.000023	Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi	Laporan		0	0	0	0	0	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2148.	3.31.000025	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan		0	0	0	0	0	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2149.	3.31.000026	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan		0	0	1	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2150.	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2151.	3.31.000031	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2152.	3.31.000032	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2153.	3.31.000033	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan		1	1	1	1	1	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2154.	3.31.000034	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan		0	0	1	0	3	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2155.	3.31.000037	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2156.	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2157.	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2158.	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota	Data		1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		berdasarkan Jumlah investasi									dan Perdagangan
2159.	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2160.	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data		0	0	0	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2161.	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		1	1	0	1	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2162.	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data		0	0	0	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2163.	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data		0	1	0	1	5	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2164.	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	1	4	4	4	Sekretariat Daerah
2165.	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	1	4	4	4	Sekretariat Daerah
2166.	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen		0	0	0	2	2	2	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2167.	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen		2	2	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2168.	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2169.	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2170.	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen		3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah
2171.	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen		2	2	2	3	2	2	Sekretariat Daerah
2172.	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2173.	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2174.	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2175.	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2176.	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2177.	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2178.	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2179.	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2180.	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2181.	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit		18	16	30	15	21	5	Sekretariat Daerah
2182.	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga		6	6	3	5	6	4	Sekretariat Daerah
2183.	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen		2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2184.	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen		2	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2185.	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen		2	4	1	1	2	2	Sekretariat Daerah
2186.	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen		0	0	1	1	0	0	Sekretariat Daerah
2187.	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
2188.	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2189.	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen		90	96	75	117	86	65	Sekretariat Daerah
2190.	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen		441	497	376	334	354	332	Sekretariat Daerah
2191.	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen		531	593	451	451	440	397	Sekretariat Daerah
2192.	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen		5	5	7	38	13	10	Sekretariat Daerah
2193.	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus		4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2194.	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus		4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2195.	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2196.	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2197.	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
2198.	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2199.	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen		2	2	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2200.	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen		2	2	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2201.	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen		2	2	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2202.	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen		0	0	2	0	0	0	Sekretariat Daerah
2203.	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2204.	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2205.	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2	2	2	2	2	3	Sekretariat Daerah
2206.	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		75	75	75	76	80	80	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2207.	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		12	12	12	12	10	12	Sekretariat Daerah
2208.	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2209.	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2210.	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2211.	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200	200	200	255	300	300	Sekretariat Daerah
2212.	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		6	6	6	6	24	12	Sekretariat Daerah
2213.	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		4	4	4	4	10	12	Sekretariat Daerah
2214.	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan		10	10	10	10	24	12	Sekretariat Daerah
2215.	4.01.000058	Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2216.	4.01.000086	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen		0	0	1	0	0	1	Sekretariat Daerah
2217.	4.01.000089	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	1	1	1	Sekretariat Daerah
2218.	4.01.000091	Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan	Dokumen		0	0	0	2	2	2	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Pengembangan Kinerja Jabatan									
2219.	4.01.000093	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen		0	0	0	1	1	1	Sekretariat Daerah
2220.	4.01.000131	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		5	5	5	10	10	10	Sekretariat Daerah
2221.	4.01.000132	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		5	5	5	5	5	5	Sekretariat Daerah
2222.	4.01.000133	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2223.	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		5	6	6	6	6	6	Sekretariat Daerah
2224.	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2225.	4.01.000136	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	Dokumen		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kearsipan, Trantibum Linmas									
2226.	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen		531	593	451	451	440	397	Sekretariat Daerah
2227.	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2228.	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		531	593	451	451	440	397	Sekretariat Daerah
2229.	4.01.000142	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
2230.	4.01.000143	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2231.	4.01.000144	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2232.	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		4	4	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2233.	4.01.000146	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2234.	4.01.000147	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		3	3	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2235.	4.01.000148	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2236.	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2237.	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		6	6	6	6	6	6	Sekretariat Daerah
2238.	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2239.	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		75	75	75	76	80	80	Sekretariat Daerah
2240.	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2241.	4.01.000155	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		200	200	200	255	300	300	Sekretariat Daerah
2242.	4.01.000156	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2243.	4.01.000159	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen		0	0	1	0	0	1	Sekretariat Daerah
2244.	4.01.000164	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen		0	0	0	1	1	1	Sekretariat Daerah
2245.	4.01.000167	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
2246.	4.01.000183	Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi	Perangkat Daerah	&Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pemda dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 UU 23/2014sebagai berikut: a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok & organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
2247.	4.01.000184	Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	1. Evaluasi dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayahnya terhadap pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 2. Evaluasi Peningkatan	21	21	21	21	21	21	Sekretariat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, serta persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu masing-masing Perangkat Daerah							
2248.	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen		0	2	1	2	1	0	Sekretariat DPRD
2249.	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1	1	2	2	2	3	Sekretariat DPRD
2250.	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		6	8	7	7	8	10	Sekretariat DPRD
2251.	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		0	0	0	1	1	0	Sekretariat DPRD
2252.	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		1	2	2	2	1	1	Sekretariat DPRD
2253.	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		1	0	0	0	0	1	Sekretariat DPRD
2254.	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD
2255.	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD
2256.	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2257.	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		4	4	4	4	2	2	Sekretariat DPRD
2258.	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Sekretariat DPRD
2259.	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		0	0	0	0	2	2	Sekretariat DPRD
2260.	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		1	0	0	0	0	1	Sekretariat DPRD
2261.	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		15	17	17	19	20	13	Sekretariat DPRD
2262.	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		9	10	12	12	16	6	Sekretariat DPRD
2263.	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		4	4	4	4	4	5	Sekretariat DPRD
2264.	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD
2265.	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		100	100	100	105	100	109	Sekretariat DPRD
2266.	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		2	3	3	2	3	2	Sekretariat DPRD
2267.	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		50	75	75	50	75	50	Sekretariat DPRD
2268.	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Sekretariat DPRD
2269.	5.01.000001	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3.	2	3	3	14	14	14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti							
2270.	5.01.000002	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2271.	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2272.	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	2	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2273.	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	1	2	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2274.	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2275.	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2276.	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan,	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				layanan umum, dan daya saing Daerah.							
2277.	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2278.	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2279.	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2280.	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2281.	5.01.000015	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2282.	5.01.000016	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2283.	5.01.000017	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2284.	5.01.000018	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2285.	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	1	1	2	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2286.	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	1	2	1	1	1	2	Badan Perencanaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		maka Rancangan Teknokratik)									Pembangunan Daerah
2287.	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2288.	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2289.	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2290.	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).							
2291.	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2292.	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2293.	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				perangkat daerah (Renstra dan Renja).							
2294.	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	1	2	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2295.	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2296.	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2297.	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah Bidang Perekonomian		hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian							
2298.	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2299.	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2300.	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2301.	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2302.	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2303.	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2304.	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2305.	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2306.	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2307.	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	2	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2308.	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan	30	30	30	30	30	30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				informasi dalam pembangunan daerah							
2309.	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	2	2	4	4	4	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2310.	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	2	1	1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2311.	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2312.	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2313.	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).							Pembangunan Daerah
2314.	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	9	9	9	9	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2315.	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2316.	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perangkat Daerah Bidang SDA		dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialisasi, dan/atau konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).							
2317.	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2318.	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2319.	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia							
2320.	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	9	9	9	9	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2321.	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	6	6	6	6	6	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2322.	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2323.	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	30	30	30	30	30	30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2324.	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	150	150	250	250	250	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2325.	5.01.000062	Peserta Musrenbang Provinsi	Orang	Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2326.	5.01.000064	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2327.	5.01.000065	Usulan yang Ter verifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	30	30	30	36	36	36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2328.	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2329.	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2330.	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2331.	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2332.	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2333.	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2334.	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2335.	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2336.	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		0	0	0	0	0	250	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2337.	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2338.	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		272	272	272	272	272	116	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2339.	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2340.	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2341.	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									Keuangan & Aset Daerah
2342.	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		352	352	352	344	344	348	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2343.	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		2	2	2	5	5	5	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2344.	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		150	150	150	150	150	150	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2345.	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		402	402	402	16	16	16	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2346.	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		0	0	1	14	14	14	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2347.	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Laporan		0	0	1	1	1	4	Badan Pendapatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi									Keuangan & Aset Daerah
2348.	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2349.	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2350.	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2351.	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2352.	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2353.	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen		0	0	0	0	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2354.	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2355.	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Keuangan & Aset Daerah
2356.	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		4	4	4	4	4	4	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2357.	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2358.	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2359.	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2360.	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2361.	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2362.	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2363.	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2364.	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2365.	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2366.	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2367.	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2368.	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		4	4	4	4	4	4	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2369.	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2370.	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		118	118	118	118	118	118	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2371.	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2372.	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2373.	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2374.	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2375.	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2376.	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		50000	50000	50000	50000	50000	50000	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2377.	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2378.	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		1456	1536	1716	1921	1976	2373	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2379.	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		431	489	486	508	748	1746	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2380.	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2381.	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		4	4	4	4	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2382.	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		4	4	4	4	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2383.	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		68	68	68	68	68	68	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2384.	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		90	90	80	80	80	80	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2385.	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		2	2	2	2	2	2	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2386.	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2387.	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2388.	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		50000	50000	50000	50000	50000	50000	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2389.	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		1357	2054	2570	2519	2799	3542	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2390.	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		12	12	12	12	12	12	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2391.	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		9	9	9	9	9	9	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2392.	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		431	489	486	508	748	1746	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2393.	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0	0	0	71	22	29	Badan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah
2394.	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN.	1	1	1	1	1	1	Badan Kepegawaian Pengembang-an Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2395.	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2396.	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		12	12	12	12	12	12	BKPSDM
2397.	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2398.	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2399.	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		12	12	12	12	12	12	BKPSDM
2400.	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		4	4	4	4	4	4	BKPSDM
2401.	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		2	2	2	2	2	6	BKPSDM
2402.	5.03.000016	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		375	665	1125	484	541	1759	BKPSDM
2403.	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2404.	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2405.	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		27	28	30	31	33	35	BKPSDM
2406.	5.03.000020	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2407.	5.03.000022	Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan		1	1	1	1	1	1	BKPSDM

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2408.	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		5	5	5	5	34	9	BKPSDM
2409.	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		2	2	2	2	2	1	BKPSDM
2410.	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		458	390	299	230	284	102	BKPSDM
2411.	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		225	273	255	170	170	170	BKPSDM
2412.	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		12	12	12	12	12	12	BKPSDM
2413.	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2414.	5.03.000047	Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen		12	12	12	12	12	12	BKPSDM
2415.	5.03.000064	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen		2	2	2	2	1	1	BKPSDM
2416.	5.03.000066	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2417.	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemerintahan Umum yang Disusun									
2418.	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		307	307	307	969	428	2715	BKPSDM
2419.	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	BKPSDM
2420.	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang		307	307	307	24	24	24	BKPSDM
2421.	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		5	5	5	5	5	5	Badan Pendidikan dan Pelatihan
2422.	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2423.	5.05.000003	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2424.	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2425.	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2426.	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2427.	5.05.000014	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2428.	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2429.	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2430.	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2431.	5.05.000019	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2432.	5.05.000020	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2433.	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2434.	5.05.000022	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2435.	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2436.	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2437.	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2438.	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2439.	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2440.	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2441.	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2442.	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2443.	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2444.	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2445.	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2446.	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2447.	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2448.	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2449.	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2450.	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2451.	5.05.000050	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2452.	5.05.000052	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2453.	5.05.000057	Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2454.	5.05.000059	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan		1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2455.	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2456.	5.05.000065	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi	Lembaga	Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2457.	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.	60	60	60	60	60	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2458.	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2459.	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Rencana Induk dan Peta Jalan adalah dokumen rancangan berisi gagasan inti beserta cara mencapai tujuan kerja organisasi.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2460.	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah.	3	3	3	3	3	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2461.	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				menopang kegiatan riset dan inovasi.							
2462.	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2463.	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2464.	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2465.	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2466.	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.							
2467.	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2468.	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2469.	5.05.000079	Kodefikasi Teknologi Masyarakat	Unit	Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum.	9	9	9	9	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2470.	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi,	5	5	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.							
2471.	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2472.	5.05.000082	Lokakarya	Dokumen	Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2473.	5.05.000083	Riset dan Seminar Internasional	Berita Acara	Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup mancanegara.	2	2	2	2	2	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2474.	5.05.000084	Pakta Kerja Sama Internasional	naskah	Pakta Kerja Sama Internasional adalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam lingkup mancanegara yang mana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2475.	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2476.	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya.							
2477.	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2478.	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2479.	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Daftar Kerja Sama adalah dokumen yang memuat rincian perjanjian kerja sama antara satu pihak dengan pihak atau banyak pihak lain untuk mencatat dan mengelola kerja sama yang dilakukan oleh Instansi dan untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus evaluasi program ke depannya.	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2480.	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi.							Pembangunan Daerah
2481.	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		46	40	42	39	33	50	Inspektorat Daerah
2482.	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		48	26	70	53	42	42	Inspektorat Daerah
2483.	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		30	30	74	50	90	81	Inspektorat Daerah
2484.	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		14	28	73	56	76	82	Inspektorat Daerah
2485.	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		2	2	2	3	3	4	Inspektorat Daerah
2486.	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		2	2	2	2	4	4	Inspektorat Daerah
2487.	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		0	0	2	2	2	2	Inspektorat Daerah
2488.	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		7	3	4	5	8	5	Inspektorat Daerah
2489.	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		4	4	4	13	4	3	Inspektorat Daerah
2490.	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		2	2	2	2	4	4	Inspektorat Daerah
2491.	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		10	8	8	11	30	30	Inspektorat Daerah
2492.	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	perangkat daerah		1	2	2	1	10	14	Inspektorat Daerah

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
2493.	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		3	3	4	14	17	16	Inspektorat Daerah
2494.	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		4	4	5	7	6	4	Inspektorat Daerah
2495.	7.01.000003	Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah	Unit		63	65	62	66	63	69	Kecamatan
2496.	7.01.000004	Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat	Unit		1	1	1	1	2	2	Kecamatan
2497.	7.01.000005	Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang	Unit		1	1	3	2	1	2	Kecamatan
2498.	7.01.000006	Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen		1	1	1	1	2	2	Kecamatan
2499.	7.01.000008	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen		21	21	21	21	21	21	Kecamatan
2500.	7.01.000009	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan		8	8	8	9	8	9	Kecamatan
2501.	7.01.000010	Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga		91	92	93	100	153	151	Kecamatan
2502.	7.01.000011	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan		7	6	6	12	11	11	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2503.	7.01.000012	Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan		9	11	11	11	10	12	Kecamatan
2504.	7.01.000013	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan		8	7	7	8	8	8	Kecamatan
2505.	7.01.000014	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan		7	3	6	3	2	21	Kecamatan
2506.	7.01.000015	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan		13	9	8	9	9	8	Kecamatan
2507.	7.01.000016	Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus	Layanan		51	64	64	72	73	97	Kecamatan
2508.	7.01.000017	BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus	Liter		3716	3716	4236	4497	4497	5754	Kecamatan
2509.	7.01.000018	KDO Kecamatan yang Dipelihara	Unit		64	64	64	72	73	97	Kecamatan
2510.	7.01.000020	Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan		6	6	6	6	2	2	Kecamatan
2511.	7.01.000021	Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan		5	5	5	5	5	5	Kecamatan
2512.	7.01.000022	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan		2	2	3	3	3	3	Kecamatan
2513.	7.01.000023	Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan		2	1	0	0	0	5	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2514.	7.01.000024	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Laporan		9	9	9	9	9	9	Kecamatan
2515.	7.01.000025	Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman	Dokumen		1	1	3	1	1	4	Kecamatan
2516.	7.01.000028	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait meliputi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi Kegiatan Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan	13	13	14	14	13	13	Kecamatan
2517.	7.01.000030	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		17	17	17	17	17	17	Kecamatan
2518.	7.01.000031	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		15	15	15	15	38	38	Kecamatan
2519.	7.01.000032	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2520.	7.01.000033	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
2521.	7.01.000035	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2522.	7.01.000036	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2523.	7.01.000037	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		2	2	2	2	2	2	Kecamatan
2524.	7.01.000041	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		284	211	212	203	258	260	Kecamatan
2525.	7.01.000042	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		59	31	57	131	135	142	Kecamatan
2526.	7.01.000043	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		85	82	82	125	204	204	Kecamatan
2527.	7.01.000044	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		0	0	1	1	1	1	Kecamatan
2528.	7.01.000045	Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100	100	101	95	183	190	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2529.	7.01.000047	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit		3	3	3	3	3	3	Kecamatan
2530.	7.01.000048	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		8	8	8	8	23	20	Kecamatan
2531.	7.01.000050	Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	11	10	9	0	0	Kecamatan
2532.	7.01.000051	Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	11	17	18	0	0	Kecamatan
2533.	7.01.000052	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	3	3	3	0	0	Kecamatan
2534.	7.01.000053	Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	5	3	2	0	0	Kecamatan
2535.	7.01.000054	Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		40	40	40	40	40	40	Kecamatan
2536.	7.01.000056	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		170	120	120	145	170	150	Kecamatan
2537.	7.01.000057	Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan	Keluarga								Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri									
2538.	7.01.000058	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		40	40	40	40	70	40	Kecamatan
2539.	7.01.000060	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		111	41	41	121	41	41	Kecamatan
2540.	7.01.000061	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		264	260	260	220	250	250	Kecamatan
2541.	7.01.000062	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga		112	247	180	200	250	370	Kecamatan
2542.	7.01.000063	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		42	82	40	84	40	135	Kecamatan
2543.	7.01.000064	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga		40	40	40	40	40	40	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2544.	7.01.000065	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		50	40	40	40	70	70	Kecamatan
2545.	7.01.000066	Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen		1	0	0	0	0	0	Kecamatan
2546.	7.01.000067	Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		1	1	1	1	1	0	Kecamatan
2547.	7.01.000071	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	13	13	13	13	13	Kecamatan
2548.	7.01.000072	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		45	7	7	9	9	9	Kecamatan
2549.	7.01.000073	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2550.	7.01.000076	Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Laporan		1	1	1	1	1	1	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
2551.	7.01.000077	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		1557	2294	1489	2594	4458	5485	Kecamatan
2552.	7.01.000078	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		473	975	589	589	914	914	Kecamatan
2553.	7.01.000079	Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		458	960	365	574	347	345	Kecamatan
2554.	7.01.000080	Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		293	795	200	200	150	150	Kecamatan
2555.	7.01.000081	Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	Laporan		1	1	2	1	1	2	Kecamatan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peraturan Perundang-Undangan									
2556.	7.01.000083	Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		2	3	4	3	3	3	Kecamatan
2557.	7.01.000084	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2558.	7.01.000088	Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		7	3	4	7	6	6	Kecamatan
2559.	7.01.000095	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		7	7	7	6	7	7	Kecamatan
2560.	7.01.000096	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Kecamatan
2561.	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat	80	5	78	78	78	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.							
2562.	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	200	0	200	200	200	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2563.	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota Paskibraka	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2564.	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota Paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	1	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2565.	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Anggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	0	0	0	0	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2566.	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota Paskibraka	60	0	60	60	60	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2567.	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait	1	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		purnapaskibraka Duta Pancasila		pemberian pembinaan lanjutan terkait Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna Paskibraka duta Pancasila							Bangsa dan Politik
2568.	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota Paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi	250	0	250	250	250	250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2569.	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota Paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	4	0	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2570.	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna Paskibraka duta Pancasila	3	0	3	3	3	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2571.	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota Paskibraka dan purnapaskibraka	1	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2572.	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna Paskibraka duta Pancasila	1	0	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2573.	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta Pancasila	0	0	0	0	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2574.	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter	5	0	5	5	5	5	Badan Kesatuan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pancasila dan Karakter Kebangsaan		kebangsaan bagi calon anggota Paskibraka dan anggota Paskibraka							Bangsa dan Politik
2575.	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka dan anggota Paskibraka	14	0	14	14	14	14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2576.	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka dan anggota Paskibraka	4	0	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2577.	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh anggota Paskibraka selama pelatihan	10	0	10	10	10	10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2578.	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota Paskibraka	130	0	130	130	130	130	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2579.	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka dan anggota Paskibraka	1	0	1	1	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2580.	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi Purnapaskibraka duta Pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2581.	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta Pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2582.	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta Pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2583.	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta Pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2584.	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta Pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	0	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2585.	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	Penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota Paskibraka	80	0	78	78	78	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2586.	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota Paskibraka dan anggota Paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80	0	78	78	78	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2587.	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas	80	0	78	78	78	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kepaskibrakaan dan purnapaskibraka							
2588.	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta Pancasila	240	0	240	240	240	240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2589.	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2590.	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	Pembentukan purnapaskibraka	80	0	78	78	78	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2591.	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta Pancasila	0	0	0	0	78	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2592.	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2593.	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	130	0	130	130	130	130	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2594.	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	10	0	10	10	10	10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2595.	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	Kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan Paskibraka	2	0	2	2	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2596.	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan Paskibraka	Unit	Kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan Paskibraka	2	0	2	2	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2597.	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2598.	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2599.	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2600.	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	0	0	0	50	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2601.	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2602.	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2603.	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2604.	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	80	0	78	78	78	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2605.	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	100	100	100	100	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2606.	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta	100	100	100	100	100	200	Badan Kesatuan

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Bangsa dan Politik
2607.	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	11	11	11	11	11	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2608.	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	725	0	763	750	850	850	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2609.	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2610.	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	475	4185	590	90	1810	1810	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2611.	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	3	3	3	4	2	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2612.	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	0	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2613.	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125	125	125	125	125	121	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2614.	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	1	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008